



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

Nomor : 0105/KONTR-PENL/V/1437/2016

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu Enam belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Ir.H.M.Amin Ishak M.Sc** : **Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**, bertindak atas nama Rektor **Universitas Muhammadiyah Makassar** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- 2. Dr. Nuryanti Mustari, M.Si** : Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah IX Tahun Anggaran 2017, **Nomor : 1586/K9/KT.03/2016**, tanggal **14 April 2016**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan *Penelitian Produk Terapan* Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan *Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Implementasi Program Reduce, Reuce, Recycle (3r) Melalui Bank Sampah Di Kota Makassar*”.

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

- 2) Pelaksanaan Penugasan *Penelitian Produk Terapan* tahun 2016 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat **Nomor DIPA-042.06.0/2016 TANGGAL 7 DESEMBER 2015**.

Pasal 2

- 3) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah)** yang berasal dari DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Nomor **DIPA-042.06.0/2016 TANGGAL 7 DESEMBER 2015** Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 35.000.000,-$ (**Tiga Puluh Lima Juta Rupiah**).
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$ (**Lima Belas Juta Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Produk Terapan Baru Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah soft copy ke **SIMLITABMAS** paling lambat tanggal 31 Agustus 2016.
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian.
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan.
 4. Berita Acara Serah Laporan Kemajuan dan Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- 2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2016.

Pasal 5

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke **SIMLITABMAS** paling lambat tanggal **30 Juli 2016** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013.

- 2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2016 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2016 sesuai ketentuan Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIMLITABMAS paling Lambat tanggal 10 Nopember 2016.
- 2) Hard Copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **10 Nopember 2016**.

Pasal 8

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Penelitian Tahun 2016, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- 3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- 1) Apabila dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 3, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksana Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar 2016.
- 2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disetorkan ke kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- 1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Penelitian Produk Terapan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal atau **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Penelitian Produk Terapan Tahun 2016 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

- 2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** yang harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
3. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
4. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
5. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- 1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- 2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ir.H.M.Amin Ishak M.Sc



Dr. Nuryanti Mustari, M.Si

Kode/Rumpun Ilmu : 605/ KEBIJAKAN PUBLIK

**LAPORAN TAHUNAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS FISIK dalam IMPLEMENTASI PROGRAM *REDUCE,*
REUSE, dan RECYCLE (3R) melalui BANK SAMPAH di KOTA
MAKASSAR**

Tahun ke 1 dari Rencana 2 Tahun

Oleh :

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

0905068003

Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

0915057101

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOVEMBER 2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Implementasi Program Reduce, Reuse dan Recycle (3R) Melalui Bank Sampah di Kota Makassar

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : NURYANTI MUSTARI S.IP
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
NIDN : 0905068003
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Nomor HP : 081355584880
Alamat surel (e-mail) : nuryantimustari@ymail.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr IHYANI MALIK S.Sos, M.Si
NIDN : 0915057101
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 50.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 142.475.000,00

Mengetahui,
Dekan Fisipol



(Dr. H. Muhlis Madani, M.Si)
NIP/NIK 196305181989031002

Makassar, 6 - 9 - 2016
Ketua,



(NURYANTI MUSTARI S.IP)
NIP/NIK 1031102

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok yakni penyandang disabilitas kurang diberdayakan dalam melaksanakan kebijakan atau program pemerintah, karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktifitas sosial, ekonomi dan politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktifitas penuh seperti masyarakat umumnya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pemberdayaan penyandang *disabilitas Fisik* dalam implementasi program *Reuse, Reduce* dan *Recycle (3R)* melalui Bank Sampah di Kota Makassar. Pengembangan Model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dilakukan melalui (1) pendekatan aksesibilitas non fisik meliputi pemberian pemahaman, dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam implementasi program 3R, dan (2) pendekatan pelatihan keterampilan kerja mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan jenis-jenis penelitian yang relevan. Pengabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, seperti *triangulasi* terhadap data-data implementasi program pemerintah *Reuse, Reduce, Recycle (3R)*. Pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang valid. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara komperhensif mengenai model pemberdayaan penyandang *disabilitas* fisik dalam implementasi program pemerintah. Penelitian ini direncanakan selama dua tahun dan pada tahun pertama akan difokuskan pada pengembangan model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implemendadi program 3R. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perilaku implementor kebijakan dalam hal ini, Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar masih perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pemberian pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas fisik. Perilaku Penyandang disabilitas fisik denga adanya sosialisasi dan pelatihan, tidak membawa perubahan kesejahteraan yang signifikan sehingga tidak sedikit yang menjadi pengemis. Perilaku hubungan antar instansi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik untuk efektifitas implementasi program *Reuse, Reduce* dan *Recycle (3R)* melalui Bank Sampah di Kota Makassar, belum efektif. Pendekatan Pemberdayaan melalui sosialisasi terkait program 3R dilakukan cukup baik oleh Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Akan tetapi tingkat partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam mengelola sampah agar bernilai ekonomis masih perlu ditingkatkan. Sedangkan dari segi pendekatan rehabilitasi pelatihan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan pelatihan kerja belum cukup mampu mendorong penyandang disabilitas ke arah yang lebih berdaya.

Kata Kunci: Pemberdayaan, *Disabilitas Fisik*, Implementasi kebijakan.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penelitian tahun pertama tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini sangat penting dilakukan dan dilanjutkan agar harkat dan martabat masyarakat penyandang disabilitas dapat meningkat. Melalui upaya pemberdayaan yang dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan aksesibilitas non fisik berupa sosialisasi dan pemberian keterampilan atau rehabilitasi keterampilan, diharapkan menjadi cara untuk membuat penyandang disabilitas bisa berdaya. Khususnya dalam implementasi program 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) yang merupakan salah satu perwujudan dari implementasi kebijakan Gerakan Makassar' Tidak Rantasa" (Gemar MTR). Penyandang Disabilitas adalah golongan minoritas yang masih kurang disentuh atau dilibatkan dalam upaya mensukseskan program atau kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat perlu berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara akademis maupun sebagai kontribusi rekomendasi terhadap pemerintah daerah.

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti, karena dapat menambah khazanah keilmuan, pengetahuan dan pemahaman terkait pemberdayaan penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, peneliti melibatkan mahasiswa untuk membantu peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan. Menambah pengalaman dan pemahaman mereka tentang unit analisis yang diteliti. Dengan honor sebagai enumerator juga dapat menolong kendala finansial mereka dalam kuliah.

Laporan tahun ke 1 ini difokuskan pada perilaku implementor kebijakan, perilaku target kebijakan dan koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program 3R di Makassar. Selanjutnya juga disajikan model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Selanjutnya pada penelitian tahun ke 2 nanti, penelitian akan difokuskan pada koordinasi antara instansi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik. Selain itu juga, simulasi rancangan model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik akan menyasar penyandang tuna rungu di Kota Makassar. Akhir kata semoga laporan kemajuan tahun ke 1 ini menjadi fondasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Semoga

Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|---|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
|---------------------|---|

| | |
|--|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| RINGKASAN | iii |
| PRAKATA..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | |
| 1.1 LatarBelakang | 1 |
| 1.2 RumusanMasalah | 3 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. State of The Art..... | 4 |
| 2.2. Pemberdayaan Masyarakat | 4 |
| 2.2.1 Pengertian Pemberdayaan | 4 |
| 2.2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat | 5 |
| 2.2.3 Penyandang Disabilitas..... | 6 |
| 2.2.4 Pendekatan dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas..... | 8 |
| 2.3. Implementasi Program <i>Reduce, Reuse dan Recycle</i> (3R) Melalui Bank Sampah | 9 |
| 2.4. Hasil Studi Pendahuluan dan Kajian yang Telah Dilakukan..... | 10 |
| 2.5. Interpretasi Kerangka Konsep..... | 11 |
| BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | |
| 3.1 Tujuan Penelitian | 13 |
| 3.2 Manfaat Penelitian | 13 |
| BAB 4. METODE PENELITIAN | |
| 4.1 Lokasi dan Sampel Paragmatik Penelitian | 13 |
| 4.2 Desain Penelitian, Pengumpulan dan Pengelolaan | 14 |
| 4.3 Analisis Data Penelitian..... | 15 |
| 4.4 Bagan Alir Penelitian | 16 |
| BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1 Perilaku Penyandang Disabilitas Fisik dan Peran Pemerintah | |
| Dalam Implementasi Program 3R..... | 18 |
| 5.2 Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Implementasi Program 3R (<i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i>) Melalui Bank Sampah di Kota Makassar | 25 |
| BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA | 36 |
| BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 7.1 Kesimpulan..... | 36 |
| 7.2 Saran..... | 37 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Presentase Kaum Disabilitas di Kota Makassar | 2 |
| Tabel 2. Bantuan fasilitas praktek pembuatan keset kaki dan pembuatan Bros bagi eks penderita kusta | 19 |
| Tabel 3. Bantuan fasilitas praktek pembuatan keset kaki dan pembuatan Bros bagi eks penderita kusta Tahun Anggaran 2015..... | 20 |
| Tabel 4. Rata-rata pendapatan selama 8 hari mengemis..... | 21 |
| Tabel 5. Kalkulasi pendapatan pengemis selama 1 bulan | 22 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Road Map Penelitian | 12 |
| Gambar 2. Skema Tahun Penelitian | 16 |
| Gambar 3. Bagan Alir Penelitian | 17 |
| Gambar 4. Pengolahan limbah eceng gondok menjadi sandal hotel | 30 |
| Gambar 5. Penyandang disabilitas eks penderita kusta memperlihatkan hasil kerajinan daur ulang kain bekas menjadi bros..... | 32 |
| Gambar 6. Pelatihan penyandang disabilitas eks penderita kusta membuat Keset kaki dari kain perca di kantor tuna netra Indonesia..... | 32 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| 1. Penerimaan Abstrak yang dipresentasikan pada Acara Seminar Nasional II Fisip Universitas Andalas..... | 40 |
| 2. Formulir peserta | 41 |
| 3. Makalah yang dipresentasikan di seminar nasional II Fisip Andalas | 42 |
| 4. Sertifikat pemakalah..... | 56 |
| 5. Prosiding..... | 57 |
| 6. Artikel Internasional..... | 59 |
| 7. Submit Jurnal Internasional Avant..... | 74 |
| 8. Instrument Penelitian | 76 |
| 9. Susunan Organisasi Peneliti..... | 77 |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan menurut Parsons dalam Suharto (2010) adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan menurut Parsons pada intinya dilakukan sebagai proses memampukan diri seseorang sehingga ia dapat berpartisipasi serta dapat berpengaruh dalam kehidupannya.

Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan rentan mengalami hambatan-hambatan yang dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Maka, diperlukannya perlakuan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka.

Penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak jumlahnya sehingga tidak boleh diabaikan keberadaannya. Berdasarkan catatan Kementerian Kesejahteraan Sosial, jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2.126.000 jiwa pada tahun 2012 dengan jenis kecacatan yang berbeda-beda. Sementara itu berdasarkan pendataan hasil kerja sama departemen sosial RI dan surveyor Indonesia pada tahun 2008 bahwa terdapatnya jumlah penyandang disabilitas (34.510 orang) di propinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di 24 kota/kabupaten.

Populasi penyandang disabilitas terdata di kota Makassar sebanyak 2.250 orang yang terdiri atas 1.794 orang penyandang disabilitas fisik, 242 orang penyandang disabilitas mental dan 214 orang penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda). terdiri atas : 1.390 laki-laki (62%) dan 860 perempuan (38%). Sedangkan berdasarkan sensus BPS tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas di

kota makassar jauh lebihbesar yaitu sebanyak 93.629 orang dengan klasifikasi yangberbeda-beda seperti tertera dalam tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1:
Persentase Kaum Disabilitas di Kota Makassar

| No | Jenis Disabilitas | Tingkat Ketergantungan | | |
|-------|--|------------------------|--------|--------|
| | | Ringan | Sedang | Parah |
| 1 | Kesulitan Melihat (Disabilitas Netra) | 40.855 | 2.757 | 43.612 |
| 2 | Kesulitan Mendengar (Disabilitas Rungu /Wicara) | 11.373 | 1.778 | 13.151 |
| 3 | Kesulitan Berjalan/Naik Tangga (Disabilitas Daksa) | 10.901 | 2.686 | 13.587 |
| 4 | Kesulitan Mengingat /Berkonsentrasi /Berkomunikasi (Disabilitas Grahita) | 9.486 | 2.422 | 11.908 |
| 5 | Kesulitan Mengurus Diri Sendiri (Disabilitas Ganda) | 8.786 | 2.585 | 11.371 |
| TOTAL | | 81.401 | 12.228 | 93.629 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 2010

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011 lalu dengan diadirkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dimana Konvensi tersebut memuat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam segala bidang aspek kehidupan. Sehingga, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, negara Indonesia wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dengan memberlakukan kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi kaum disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, baik terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik bagi penyandang disabilitas.

Setiap penyandang *disabilitas* mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Termasuk kesempatan berkontribusi dalam mendukung program pemerintah kota yang ada, dalam hal ini

program pemerintah kota Makassar yang merupakan derivasi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah (3R) adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Program atau Kegiatan 3R sebenarnya sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Hal ini juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas punya peluang dan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, dalam mengimplementasikan kegiatan 3R. Meski sederhana, namun dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Bahkan dengan upaya yang sungguh-sungguh, penyandang disabilitas dapat berdaya dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sebagai program yang berdasar pada perubahan perilaku manusia, tentu 3R tidak semudah yang dibayangkan. Butuh perencanaan yang matang. Butuh komitmen kuat untuk penegakannya. Dan yang terpenting juga butuh dukungan kolektif dan komprehensif dari semua *stakeholder* tak terkecuali dalam hal ini masyarakat penyandang *disabilitas*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perilaku penyandang disabilitas fisik dan peran pemerintah (birokrat) dalam mengimplementasikan program 3R dan
2. Bagaimana pengembangan model pemberdayaan penyandang disabilitas dengan pendekatan aksesibilitas non fisik dan rehabilitasi pelatihan

keterampilan kerja dalam implementasi program 3R melalui Bank sampah di Kota Makassar.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of The Art

Permasalahan penyandang disabilitas (cacat) timbul karena adanya gangguan pada fisik maupun mental mereka yang menghambat aktifitas sosial, ekonomi, maupun politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktifitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Untuk memecahkan pokokpermasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan. Di dalam penelitian ini akan dikembangkan model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik diantaranya : tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa dan tuna laras dengan 2 pendekatan yaitu (1) pendekatan aksesibilitas dengan memberikan pemahaman dan kesempatan untuk menjadi pelaku/subjek dalam implementasi 3R melalui Bank sampah, (2) pendekatan rehabilitasi pelatihan keterampilan kerja dengan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna. Dengan dua pendekatan tersebut akan tercipta suatu model yang cocok sebagai strategi yang dapat diterapkan pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam implementasi program 3R, sehingga nantinya akan dicapai kondisi mental sosial, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas sebagai modal dasar meningkatkan kesejahteraannya.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang diEropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, danawal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa :*Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them*

to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on (Ife, 1995).

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil pembangunan." Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

2.2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantuklien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997).

Sementara itu Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Sementara itu, Sutrisno (2000) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah. Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidak berdayaan menjadi berdaya dengan menitik beratkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat.

Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga non government organization hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator.

2.2.3 Penyandang *Disabilitas*

Menurut *General Election Network For Disability Acces* (2013) Berdasarkan laporan ESCAP (*The Economic and Sosial Commission for Asia and the Pasific*), bahwa setiap negara memiliki definisinya sendiri tentang disabilitas. Bahkan, di beberapa negara seperti Indonesia, setiap badan pemerintahan memiliki istilah dan definisinya sendiri. Keragaman definisi membuat organisasi internasional seperti *Disabled People's International* (DPI) memutuskan untuk tidak mengadopsi atau membuat definisi untuk menghindari kemungkinan terjadi perselisihan dengan pihak lain. Namun, kini terjadi perkembangan transisi dalam memandang disabilitas dari model medis ke model sosial. Model medis memandang disabilitas sebagai masalah kesehatan, sementara model sosial memandang disabilitas sebagai hasil dari interaksi sosial. Kedua model ini tidak dapat didefinisikan secara terpisah

karena disabilitas juga berakar dari dan mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang dan kedua model ini saling melengkapi.

Definisi disabilitas berdasarkan *Disability Discrimination Act* (DDA) bahwa “Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki gangguan fisik atau mental yang memiliki efek samping yang besar dan jangka panjang pada kemampuannya untuk melaksanakan aktivitas normal sehari-hari”.

Terdapat kriteria penyandang *disabilitas* dalam *Disability Discrimination Act* (DDA) yaitu:

- a. Mereka yang memiliki gangguan mental atau fisik.
- b. Gangguan tersebut memiliki efek yang buruk pada kemampuan mereka untuk melaksanakan kegiatan normal mereka sehari-hari.
- c. Gangguan tersebut memiliki efek samping yang substansial dan jangka panjang (telah berlangsung selama 12 bulan atau lebih atau selama sisa hidup seseorang).

World Health Organization (WHO) memiliki definisi sendiri mengenai disabilitas. Menurut WHO, disabilitas diartikan sebagai: istilah umum yang memiliki gangguan fungsi tubuh atau struktur, keterbatasan aktifitas dan pembatasan partisipasi. Dalam hal ini meliputi gangguan dalam fungsi tubuh atau struktur, pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh seseorang individu dalam keterlibatannya *dalam* kehidupan sehari-hari. Jadi disabilitas adalah fenomena yang kompleks yang mencerminkan interaksi antara bagian tubuh seseorang dan bagian dari masyarakat dimana dia tinggal.

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kaum disabilitas. Salah satunya adalah undang-undang mengenai Penyandang Cacat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Pada pasal 1 disebutkan bahwa:

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;
- b. Penyandang cacat mental yaitu kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental yaitu seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

2.2.4 Pendekatan dalam Memberdayakan Penyandang *Disabilitas*

a) Model Aksesibilitas

Model Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (UU No.4 Tahun 1997 pasal 1 ayat4).

b) Model Rehabilitasi

Model Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosial dan berinteraksi aktif di tengah keluarga/masyarakat dan lingkungannya (UU No.4 Tahun 1997 pasal 17).

Rehabilitas penyandang *disabilitas* meliputi:

- Rehabilitasi Sosial, yakni untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang *disabilitas* agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.
- Rehabilitasi Pendidikan, yakni agar penyandang *disabilitas* dapat pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
- Rehabilitasi Pelatihan Keterampilan Kerja, yakni agar penyandang *disabilitas* memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

2.3 Implementasi Program *Reduce, Reuse dan Recycle*(3R) Melalui Bank Sampah.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah (3R) adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui bank sampah. Suatu upaya sistematis dalam membudayakan perilaku yang baru dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan masif karena setiap warga masyarakat melakukannya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik berpotensi untuk diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik disetorkan ke bank sampah. Tujuan dibangunnya bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian peranserta masyarakat agar dapat “bersahabat” dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus bersinergi dengan gerakan 3R (*reuse, reduce, recycle*), sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Pelaksanaan bank sampah diharapkan akan memberikan sebuah nilai tambah serta nilai ekonomis terhadap sampah. Keberadaan bank sampah juga akan menjadikan realisasi konsep ekonomi kerakayatan yang dapat dan mudah untuk diimplementasikan oleh siapapun termasuk penyandang

disabilitas. Bank sampah juga mampu memberikan manfaat utamanya keuntungan masyarakat dari sampah tersebut. Dalam Implementasi Program 3R merujuk pada model implementasi kebijakan publik menurut Menurut Winter dalam Nugroho(2007), Mengidentifikasi empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (1) Proses pormasi kebijakan, (2) Perilaku Organisasi implementasi, (3) Prilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah (*street-level bureaucrats*), (4) Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat. Sehingga pada penelitian ini digunakan model Winter untuk menjawab permasalahan pokok yang pertama, tentang deskripsi perilaku penyandang disabilitas fisik dan peran pemerintah (birokrat) dalam mengimplementasikan program 3R, kemudian dari deskripsi masalah terkait perilaku penyandang disabilitas, maka selanjutnya akan dilakukan pengembangan model pemberdayaan penyandang disabilitas dengan pendekatan aksesibilitas non fisik dan rehabilitasi pelatihan keterampilan kerja dalam implementasi program 3R melalui Bank sampah di Kota Makassar.

2.4 Hasil Studi Pendahuluan dan Kajian yang Telah Dilakukan

Hasil penelitian Megayani Putri (2014) yang berjudul Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam Pelayanan Kesehatan Prima bagi Penderita Intellectual Disability di kampung Idiot (Studi di Kecamatan Jomban) adalah adanya kebijakan pemerintah meningkatkan akses keterjangkauan obat dan pelayanan kesehatan. Pemerintah dalam hal ini melakukan inovasi mengadakan posyandu bagi penderita *Intellectual Disability*. Implementasi pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat penyandang *intellectual disability* masih dikategorika belum prima.

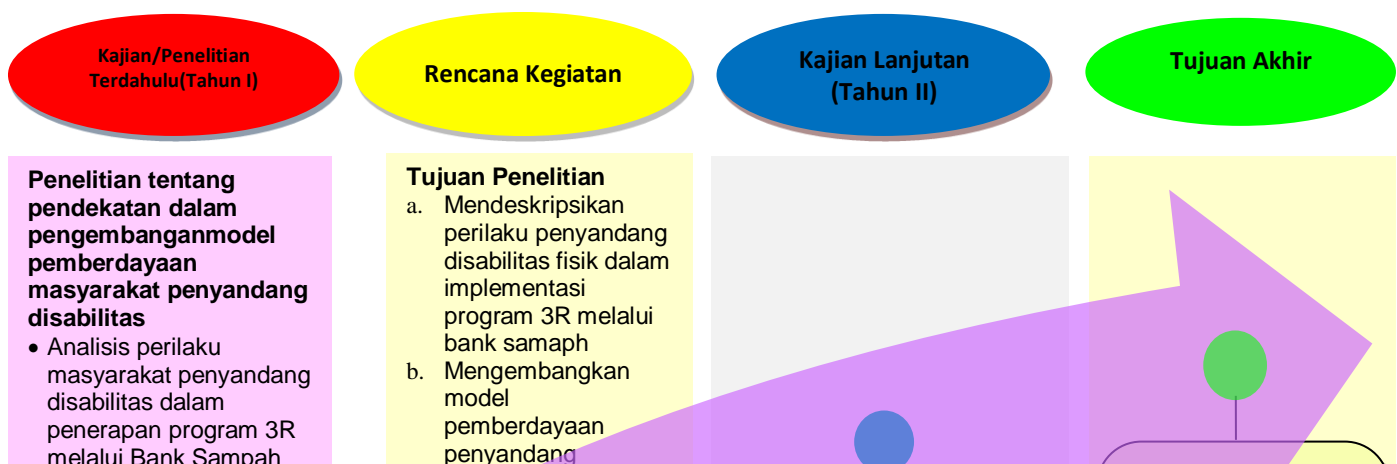
Beberapa penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang pemberian layanan pemerintah kepada penyandang disabilitas, misalnya layanan kesehatan. Penyandang disabilitas belum menunjukkan peran dan partisipasinya secara riil dalam pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah. Penyandang disabilitas hanya menjadi objek pembangunan, belum tampil sebagai aktor /subjek dalam implementasi program 3R melalui bank sampah di Kota Makassar. Dengan

melibatkan mereka, melalui pendekatan aksesibilitas dan rehabilitasi pelatihan, mereka akhirnya akan mandiri dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya dalam kehidupan bermasyarakat.

2.5 Interpretasi Kerangka Konsep

Interpretasi yang dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program 3R, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja masyarakat penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri di tengah masyarakat, dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas Fisik adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.
2. Pendekatan aksesibilitas fisik adalah adanya pemberian pemahaman dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam implementasi program *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui bank sampah. Pendekatan ini perlu dilakukan untuk memberi pemahaman awal kepada penyandang disabilitas sehingga terjadi perubahan perilaku dalam mengimplementasikan program 3R. Selain itu penyandang disabilitas fisik diberi kesempatan yang sama dengan masyarakat umumnya untuk terlibat dalam kegiatan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui bank sampah di Kota Makassar
3. Pendekatan Rehabilitasi Pelatihan Kerja adalah pemberian pelatihan (*training*) upaya pembatasan sampah (*Reduce*), *training* guna ulang sampah (*Reuse*), dan *training* daur ulang sampah (*Recycle*).
4. Pengembangan model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik menekankan pada pendekatan aksesibilitas dan rehabilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang disabilitas.



BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan perilaku penyandang disabilitas fisik dan peran pemerintah dalam mengimplementasikan program 3R melalui Bank sampah di Kota Makassar.
- b. Mengembangkan model pemberdayaan dengan pendekatan aksesibilitas non fisik dan rehabilitasi pelatihan keterampilan kerja dalam mengimplementasikan program 3R melalui Bank Sampah di Kota Makassar

3.2 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini sangat diperlukan untuk pengembangan model pemberdayaan penyandang *disabilitas* dalam implementasi program 3R melalui bank sampah di Kota Makassar, dimana selama ini model pemberdayaan masyarakat penyandang *disabilitas* khususnya disabilitas fisik belum efisien dalam implementasi program pemerintah terkait pengelolaan sampah
- b. Dengan langkah pengembangan model pemberdayaan masyarakat penyandang *disabilitas* diharapkan pemerintah khususnya pemerintah Kota Makassar dapat menemukan strategi awal dalam upaya memberdayakan masyarakat penyandang *disabilitas*, sehingga mereka juga bisa mandiri dalam rangka mengangkat harkat dan martabat masyarakat penyandang disabilitas dalam kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Makalah akan di presentasikan dalam seminar Nasional dan akan dibuatkan buku ajar.

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Sampel Pragmatik Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada beberapa institusi yang terkait secara langsung dengan aktivitas pemberdayaan penyandang *disabilitas* fisik dalam implementasi program *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) melalui bank sampah di

kota Makassar. Lokasi penelitian ini terpusat di Makassar karena instansi dan lembaga atau objek penelitian juga berada di wilayah Makassar.

4.2 Desain Penelitian, Pengumpulan dan Pengelolaan

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis-jenis penelitian yang relevan seperti *triangulasi* untuk memperoleh sumber-sumber informasi mengenai implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* melalui bank sampah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana model pemberdayaan penyandang *disabilitas* fisik dalam implementasi program pemerintah *3R* di kota Makassar.

Data-data yang akan diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap obyek sasaran yakni penyandang *disabilitas* fisik. Wawancara dan observasi yang mendalam dilakukan untuk mendapatkan data apa adanya atau sebagaimana yang terjadi tanpa memanipulasi dan menggeneralisasi (Sugiono, 2008). Sedangkan data sekunder akan didapatkan dengan penelusuran dokumentasi sumber-sumber penyandang *disabilitas* dengan menggunakan pendekatan positivistik, dalam implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* melalui bank sampah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat penyandang *disabilitas* fisik di Kota Makassar.

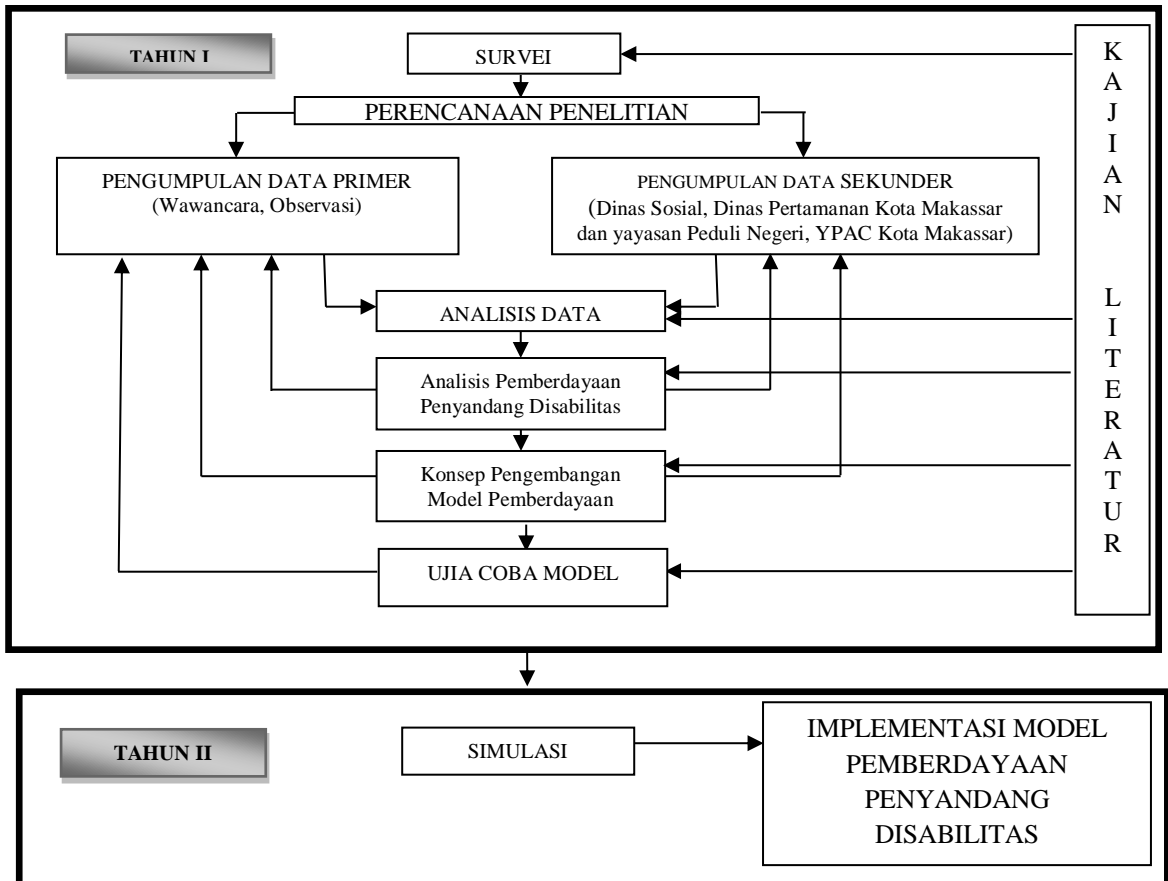
Pengelolaan data kualitatif dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memberikan kategori, mensistematisir dan memproduksi makna atas apa yang menjadi variabel penelitian. Ada tiga langkah pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan

penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Reduksi data dalam tahap ini, peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh. Penyajian data yaitu peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengembalian tindakan dan display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

4.3 Analisis Data Penelitian

Analisis data primer dilakukan atas statemen (*statement*) atau persyaratan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna dari statemen yang ada, baik makna yang bersifat implisit maupun makna eksplisit dari pernyataan atas objek yang diteliti. Uraian makna yang dikemukakan akan menunjukkan kecenderungan arah jawaban atau pengertian yang dimaksudkan oleh para informan. Sedangkan analisis data sekunder dilakukan dengan cara mendeskripsikan seluruh data-data potensi daerah khususnya data yang telah tersedia atau terdokumentasi pada masing-masing daerah, kemudian di analisis keterkaitannya dengan data primer yang diperoleh dari para informan.

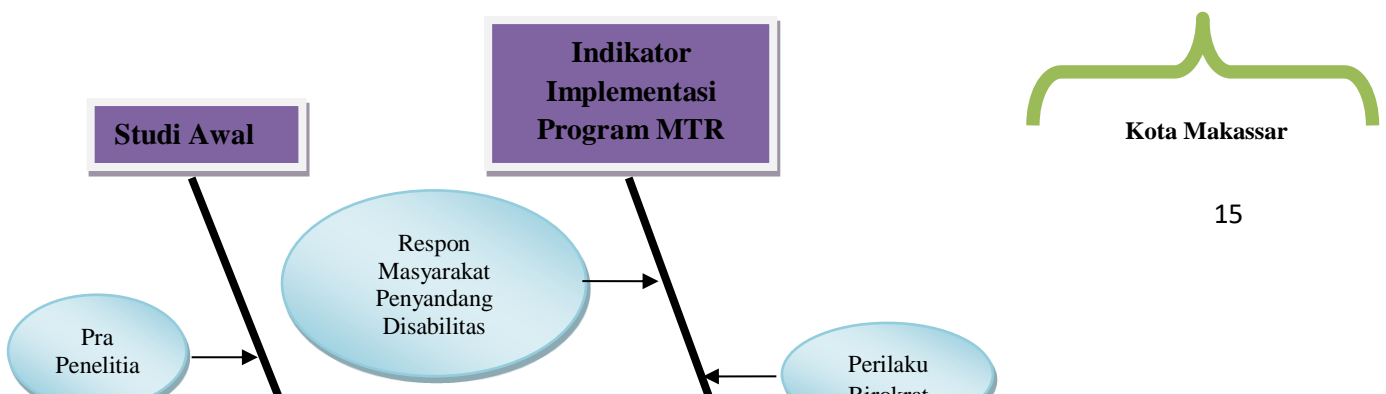
Selengkapnya arah kepada tujuan umum jangka panjang penelitian yang dilakukan dalam penelitian Hibah Bersaing akan digambarkan dalam skema berikut :



Gambar 2 :Skema Pertahun Penelitian

4.4 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian ini menggambarkan apa yang akan dilaksanakan untuk 2 tahun dalam bentuk *fishbone diagram* sebagaimana terlihat di bawah ini:



BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perilaku Penyandang Disabilitas Fisik dan Peran Pemerintah dalam Implementasi Program 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*)

Berdasarkan Hasil Penelitian, merujuk pada teori Soren C. Winter (1990) yang terkait implementasi kebijakan, disebutkan bahwa efektifitas implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi;
2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional
3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Pada Dimensi pertama, perilaku implementor digambarkan berikut: Beberapa sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara parsial masing-masing instansi, baik dinas sosial maupun kantor pemberdayaan perempuan dan anak Kota Makassar.

Dinas Sosial Kota Makassar melakukan sosialisasi di Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate merupakan kompleks penderita kusta, tentang cara memilah dan mendaur ulang sampah. Pelatihan dan pemberian keterampilan mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis seperti bros, keset kaki, tas atau polibag tanaman dari sachet minyak goreng, dan pot gantung dari botol bekas juga dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Sosialisasi belum dilakukan secara *Door to door* tentang program 3R dalam rangka implementasi kebijakan MakassarTa' tidak rantasa'.

Pada kegiatan pelatihan atau pemberian keterampilan, Dinas Sosial Kota Makassar memberikan bantuan sarana atau fasilitas praktek pembuatan keset kaki

dan praktek pembuatan bros pada kegiatan pembentukan sentra kerajinan tangan bagi eks kusta Tahun anggaran 2015, dengan rincian :

Tabel 2:
Bantuan Fasilitas praktek pembuatan keset kaki dan pembuatan bros bagi EksPenderita Kusta Tahun Anggaran 2015

| No | Nama Barang | Volume | Satuan |
|--|-------------------------|--------|---------|
| Jenis Kegiatan : Praktek Pembuatan Keset Kaki | | | |
| 1 | Mesin Jahit | 5 | buah |
| 2 | Kain Kaos | 45 | meter |
| 3 | Jarum Tangan | 15 | buah |
| 4 | Benang | 15 | lusin |
| 5 | Gunting Besar | 5 | buah |
| 6 | Mesin Obras | 3 | buah |
| Jenis Kegiatan : Praktek Keterampilan Pembuatan Bros | | | |
| 1 | Mesin Jahit | 2 | buah |
| 2 | Jarum tangan | 5 | lusin |
| 3 | Benang | 11 | lusin |
| 4 | Gunting Besar | 3 | buah |
| 5 | Mesin Obras | 2 | buah |
| 6 | Pres kancing | 6 | buah |
| 7 | Tembak Lem Lilin | 5 | buah |
| 8 | Manik Mutiara | 30 | bungkus |
| 9 | Kain Planel | 30 | meter |
| 10 | Kain Tile | 30 | meter |
| 11 | Piring Bros | 20 | bungkus |
| 12 | Kain Sutra | 10 | meter |
| 13 | Pentul | 10 | bungkus |
| 14 | Pita | 15 | gulung |
| 15 | Cetakan kancing bungkus | 10 | bungkus |
| 16 | Jepitan rambut | 1 | pak |
| 17 | Lem lilin | 2 | pak |
| Jenis Kegiatan : Praktek keterampilan pembuatan lampu hias | | | |
| 1 | Lampu | 80 | buah |
| 2 | Kabel | 170 | meter |
| 3 | Fiting | 80 | buah |
| 4 | Steker | 80 | buah |
| 5 | Tembak lem lilin | 20 | buah |
| 6 | Lem lilin | 20 | pak |
| 7 | Kertas kado | 5 | pak |
| 8 | Lem plastik | 9 | buah |
| 9 | Lem kertas | 10 | buah |
| 10 | Tang | 10 | buah |
| 11 | Obeng | 20 | buah |
| 12 | Pilox | 20 | botol |

| | | | |
|----|---------|----|------|
| 13 | Cater | 20 | buah |
| 14 | Gunting | 40 | buah |

Hasil Olahan data Sekunder, Dinas Sosial Kota Makassar, 2016

Dinas Sosial Kota Makassar juga memberikan bantuan fasilitas praktek usaha penjahitan kepada Wanita Penyandang Disabilitas pada kegiatan jaminan sosial bagi wanita penyandang disabilitas melalui pemberdayaan keterampilan Tahun Anggaran 2015 yang berdomisili di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3:
Bantuan Fasilitas pembuatan keset kaki dan pembuatan bros bagi Eks Kusta
Tahun Anggaran 2015

| No | Nama Barang | Volume | Satuan |
|---|---------------|--------|--------|
| Jenis Kegiatan : Barang persediaan usaha penjahitan | | | |
| 1 | Mesin Neci | 1 | Unit |
| 2 | Mesin jahit | 2 | Unit |
| 3 | Jarum mesin | 2 | Pak |
| 4 | Jarum Tangan | 5 | Pak |
| 5 | Benang | 5 | Dos |
| 6 | Gunting besar | 10 | Buah |
| 7 | Lemari | 1 | Buah |
| 8 | Box benang | 6 | Buah |

Hasil Olahan data Sekunder, Dinas Sosial Kota Makassar, 2016

Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan upaya pemberian pelatihan sekaligus pemberian bantuan sarana atau fasilitas keterampilan menjahi dan fasilitas untuk pembuatan lampu hias. Hal ini dimaksudkan agar penyandang disabilitas fisik khususnya tuna daksa dan wanita penyandang disabilitas di kota Makassar bisa lebih berdaya dengan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan Makassar Ta' tidak rantasa melalui program pengurangan dan dur ulang sampah (*Reuse, Reduce dan Recycle*). Melalui pelatihan yang diberikan, penyandang disabilitas fisik dapat mengelola sampah menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan Pengamatan dan wawancara peneliti, diketahui bahwa Perilaku pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Badan pemberdayaan perempuan Kota Makassar, melakukan sosialisasi terbatas pada kegiatan Reuse dan Recycle dalam

mengelola sampah. Perubahan pola pikir masyarakat untuk mengurangi (*Reduce*) secara khusus belum terwujud dengan baik.

Pada Dimensi kedua teori implementasi kebijakan Winter tentang perilaku target/sasaran kebijakan, yang dimaksudkan adalah penyandang disabilitas fisik yang disasar untuk diberdayakan. Perilaku penyandang disabilitas fisik setelah diberikan sosialisasi tentang 3R dalam implementasi kebijakan Makassar' Tidak Rantasa' menunjukkan perubahan pola pikir dari membuang sampah menjadi mengelola sampah. Mereka mengelola sampah dengan melakukan daur ulang sampah, menjadi keset kaki, bros, lampion dan tas. Bahkan pernah bekerjasama dengan Mahasiswa aksi muda Indonesia. Akan tetapi sejak bulan April sampai saat ini, produksi keset kaki dihentikan karena penwaran dari mitra tidak sesuai dengan harapan pemroduksi dalam hal ini penyandang disabilitas fisik eks kusta.

Dampak pelatihan bagi sebagian besar penyandang tuna daksa tidak memberi manfaat yang signifikan. Sebagian besar penyandang tuna daksa aktif sebagai pengemis dari pagi sampai sore hari. Mereka beranggapan bahwa menjadi pengemis lebih menguntungkan dikarenakan mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat.

MS penyandang disabilitas tuna daksa bekerja sebagai pengemis sejak tahun 1995. MS mengemis dua kali dalam seminggu berangkat subuh dan pulang sore hari. Pendapatan dalam sehari dari mengemis berkisar antara Rp.100.000-Rp.180.000. Selain dari hasil mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pak mansyur juga mendapatkan bantuan jaminan sosial dari Dinas Sosial Kota Makassar sebanyak 125 ribu setiap bulan. Jika dikalkulasi pendapatan pak mansyur dari hasil mengemis dalam sebulan 1.440.000 selama 8 hari.

Tabel 4:
Rata-Rata Pendapatan selama 8 hari mengemis

| NO | MINGGU | HARI 1 | HARI 2 | JUMLAH |
|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 1 | MINGGU 1 | 180 | 180 | 360z |
| 2 | MINGGU 2 | 180 | 180 | 360 |
| 3 | MINGGU 3 | 180 | 180 | 360 |
| 4 | MINGGU 4 | 180 | 180 | 360 |
| TOTAL | | | | 1.440.000 |

Hasil olahan data primer, 2016.

Selanjutnya, BT juga bekerja sebagai pengemis sejak putus sekolah dari kelas 3 SD hingga sekarang usianya 65 tahun masih bekerja sebagai pengemis. Dalam sehari BT bisa mendapat penghasilan berkisar Rp90.000-Rp.100.000. Selain BT juga mendapatkan bantuan sosial sebanyak 125 ribu setiap bulannya dari Dinas Sosial Kota Makassar.

Tabel 5 :
Tabel : Kalkulasi Pendapatan mengemis selama 1 bulan

| NO | MINGGU | HARI 1 | HARI 2 | HARI 3 | HARI 4 | HARI 5 | HARI 6 | HARI 7 | JUMLA H |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 1 | MINGGU1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| 2 | MINGGU2 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| 3 | MINGGU3 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| 4 | MINGGU4 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| 5 | MINGGU5 | 100.000 | 100.000 | | | | | | 200.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 3.000.00/ bulan |

Sumber : Olahan Data Primer, 2016

US yang berprofesi sebagai pemulung yang telah bekerja sebagai pemulung selama 12 tahun, setiap harinya bekerja untuk memulung dari jam 5 subuh hingga jam 6 sore. Hasil yang didapatkan oleh pak usman dari hasil memulung jika 1 hari ditimbang maka mendapatkan 70ribu-100ribu dan jika dalam 1 minggu lalu ditimbang maka mendapatkan 200 ribu. Berarti dalam 1 bulannya hanya mendapatkan Rp.800.000

SH yang merupakan tetangga dari pak usman juga berprofesi sebagai pemulung. SH menggeluti profesi sebagai pemulung sudah 4 tahun, setiap harinya berangkat jam 3 atau 4 subuh untuk memulung dan pulang pukul 6 pagi. Hasil memulung tersebut jika dikumpulkan selama 3-5 hari lalu dilalu ditimbang maka menghasilkan 100-110ribu tetapi jika dikumpulkan dulu selama 1 minggu lalu ditimbang maka mendapatkan 300ribu, sehingga ketika dikalkuasi pendapatan sebagai pemulung dalam sebulan Rp.1.200.000. kesenjangan penghasilan mengakibatkan sebagian besar masyarakat diperkapungan kusta masih memilih menjadi pengemis ketimbang melakukan kegiatan pengelolaan sampah dalam hal ini mengurangi dari sumber, mengumpul dan mendaur ulang sampah. Terdapat juga beberapa variabel lain yang mengakibatkan tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat belum optimal dalam pengelolaan sampah, khususnya

program 3R yaitu disebabkan pendampingan dan sosialisasi dilakukan secara temporal. Efektifitas implementasi 3R dalam rangka pemberdayaan penyandang disabilitas fisik akan terwujud apabila kegiatan pendampingan dan sosialisasi secara kontinyu dilakukan. Tahap peningkatan peran serta masyarakat dimulai dari tahap kognitif (tahap mengetahui), tahap afektif (tahap memperhatikan), dan tahap tahap mencoba, tahap melakukan.

Pada Dimensi ketiga efektifitas implementasi kebijakan menurut Winter adalah koordinasi antar instansi dalam implementasi program 3R melalui bank sampah di Kota Makassar. Hubungan antar organisasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program *Reuse, Reduce* dan *Recycle (3R)* melalui Bank Sampah di Kota Makassar, belum efektif. Koordinasi antar dinas sosial dan dinas kebersihan belum berjalan secara baik. Koordinasi merupakan suatu penyelarasan atau penyusunan kembali kegiatan yang saling bergantung antara individu-individu tertentu yang memiliki tujuan yaitu pencapaian tujuan bersama (Moekijat, 1994). Sebuah koordinasi dapat dilakukan apabila kedua pihak menciptakan suatu kegiatan yang didalamnya saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa semua instansi (SKPD) kota Makassar wajib mensukseskan implementasi kebijakan Makassar-Ta' tidak rantasa'. Akan tetapi kerjasama antar instansi dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan 3R secara khusus kepada penyandang disabilitas, belum pernah dilakukan.

Kerjasama ataupun koordinasi khusus antara Dinas Pertamanan dan Kebersihan dengan Dinas Sosial belum terjalin dalam memberdayakan penyandang disabilitas, karena pada dasarnya Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam memberdayakan masyarakat melalui 3R dilakukan secara umum dan belum pernah dilakukan secara khusus kepada penyandang disabilitas fisik. Pemberdayaan melalui program 3R dilakukan secara umum pada masyarakat, melakukan sosialisasi dengan berkerjasama dengan pihak kecamatan. Dari kerjasama Dinas kebersihan dengan kecamatan maka pihak kecamatan melalui lurah kemudian turun ke RT/RW mengajak masyarakatnya untuk mengikuti sosialisasi. Meskipun secara

umum dilakukan bukan berarti penyandang disabilitas tidak dapat ikut dalam sosialisasi tersebut, karena pada dasarnya penyandang disabilitas juga bagian dari masyarakat.

Begitupun dengan dinas sosial, walaupun tidak bekerjasama dan berkoordinasi langsung dengan Dinas Kebersihan, dinas sosial sebagai instansi di kota Makassar tetap turut mendukung program pemerintah dengan melakukan pemilahan sampah seperti instruksi dari walikota misalnya seluruh SKPD diminta untuk menjadi nasabah bank sampah melakukan pemilahan sampah lalu dikumpulkan kemudian dibawa ke bank sampah. Hal tersebut mendukung pemberdayaan masyarakat dengan program 3R melalui bank sampah. Akan tetapi koordinasi belum terlaksana dengan baik sehingga upaya pemberdayaan belum cukup meberdayakan masyarakat penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, khususnya pada perkapungan kusta di Jalan Dangko Jongaya. Padahal penyandang cacat adalah juga bagian dari *civil society*.

Penyandang disabilitas fisik akan mampu berdaya jika selain diberikan kesempatan yang sama seperti masyarakat pada umumnya, pemerintah sebagai fasilitator juga harus memfasilitasi secara penuh kebutuhan-kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik. Memenuhi segala kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik merupakan bagian yang terpenting dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik, hal ini dikarenakan penyandang disabilitas fisik memiliki keterbatasan fisik berbeda dari mereka yang memiliki fisik yang normal. Maka sudah sewajibnya pemerintah memenuhi aksesibilitasnya dan memberikan pelakuan khusus terhadapnya. Dengan terpenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas fisik maka akan membantu mereka untuk mampu berdaya.

5.2. Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Implementasi Program 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) melalui bank sampah di Kota Makassar

Pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program *Reduce, Reuse dan Recycle (3R)* dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan aksesibilitas non fisik dan Pendekatan Rehabilitasi Pelatihan.

5.2.1 Pendekatan Aksesibilitas Non Fisik

Terkait dengan Kebijakan pemerintah tentang Pengelolaan sampah di Makassar yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kota Makassar tentang Pengelolaan sampah pada BAB IV pasal 5 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Tujuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 yang berbunyi Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber Daya.

Program Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa' (GEMAR MTR), Sebagai suatu langkah strategis dalam menangani persoalan sampah yang sampai saat ini masih menjadi keresahan warga Kota Makassar. Kehadiran Program ini diharapkan dapat menjadi solusi, sehingga mampu mewujudkan Kota Makassar Bebas dari ancaman sampah, dan Juga program ini diharapkan dapat menunjang keberhasilan Visi Kota Makassar yaitu "Makassar Menjadi Kota yang Nyaman Untuk Semua

Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa' (GEMAR MTR) di Kota Makassar, menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Perlu melibatkan semua unsur pemerintahan, Pihak Swasta dan seluruh elemen Masyarakat tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas., untuk mengatasi masalah persampahan.

Berbagai strategi dalam pengelolaan sampah telah dilakukan, misalnya program 3R melalui bank sampah. Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui bank sampah juga telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Makassar. Dalam

menjalankan Program Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa' (GEMAR MTR), Pemerintah Kota melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bersama akan dapat mewujudkan Makassar Ta' Tidak Rantasa', Tanpa adanya partisipasi dari semua pihak program ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah dan masyarakat mempunyai komitmen tentang pentingnya kerjasama untuk mendukung setiap kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mensejahterahkan, meningkatkan harkat dan martabat serta menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas fisik. Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik pemerintah ataupun organisasi non pemerintah sebagai pelaku pemberdayaan harus lebih memperhatikan langkah-langkah yang efektif untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik. Untuk mewujudkan pemberdayaan disabilitas fisik maka bagi pelaku atau pelaksana pemberdayaan harus memfasilitasi dan mendukung pengembangan kapasitas melalui pertukaran berbagai informasi, pengalaman, program-program pelatihan, dan praktik yang mampu untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas fisik.

Pemerintah diharapkan mendukung organisasi penyandang disabilitas fisik yang telah ada dan bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas fisik tersebut dalam hal untuk memberdayakan dan memenuhi setiap kebutuhan penyandang disabilitas fisik. Pada dasarnya penyandang disabilitas fisik mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seperti masyarakat pada umumnya. Dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan, setiap penyandang disabilitas fisik mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Peran pemerintah sangat penting untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka. Dinas Sosial Kota Makassar, Khususnya bidang rehabilitasi sosial berperan diantaranya melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental serta fisik dan mental. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Terdapat dua pendekatan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik yaitu pendekatan aksesibilitas non fisik dengan memberikan pemahaman 3R,

pemberian kesempatan untuk berpartisipasi serta Pendekatan Rehabilitasi Pelatihan.

Dinas Sosial Kota Makassar melakukan sosialisasi di Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate yang melibatkan penyandang tuna daksa. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut Dinas sosial Kota Makassar memberikan pemahaman cara memilah sampah dan mendaur ulang sampah dengan tujuan untuk membantu mengurangi timbulnya sampah di Kota Makassar.

Menurut pengakuan Masyarakat Kelurahan Balang Baru terkhusus penyandang tuna daksa kegiatan tersebut diharapkan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas tuna daksa dalam mengubah pola pikir mereka untuk lebih memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih berguna dan bernilai ekonomis. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Makassar secara langsung menunjukkan bahwa penyandang disabilitas telah diberikan kesempatan dan turut berpartisipasi dalam mendukung program Makassar ta' Tidak Rantasa. Sosialisasi tersebut juga pernah dilaksanakan di kelurahan Buloa Kecamatan Tallo. Dalam sosialisasi tersebut ada beberapa hal penting yang dijelaskan yakni kebijakan pemerintah pusat tentang pengurangan kantong plastik (ditekan kantong plastic) dihimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan. Merubah perilaku konsumtif yang banyak menghasilkan sampah menjadi perilaku yang minim kantong plastik. Selain itu dinas kebersihan juga menghimbau masyarakat untuk membentuk bank sampah atau minimal menjadi nasabah bank sampah untuk mengurangi sampah yang di buang ke TPA dan lingkungan bersih dan tetap menerapkan perilaku lisa (lihat sampah ambil), menjadikan lorong-lorongnya bersih dan hijau (lorong garden) dan tetap bekerja bakti setiap Sabtu dan Minggu. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar untuk masyarakat umum, tidak dikhususkan kepada penyandang disabilitas.

Pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dengan pendekatan aksesibilitas non fisik pada dasarnya merupakan pendekatan awal untuk mengubah pola pikir penyandang disabilitas terhadap segala hal yang dapat menimbulkan sampah dan dari sampah dapat didaur ulang menjadi produk yang bernilai ekonomis. Setelah

pendekatan aksesibilitas non fisik ini mampu mengubah pola pikir penyandang disabilitas fisik, maka secara perlahan akan mengubah pola hidup penyandang disabilitas fisik, yang awalnya kurang peduli akan menjadi peduli. Perubahan pola pikir dalam implementasi program 3R, terlaksana cukup baik terlihat dari berubahnya pola hidup beberapa penyandang disabilitas fisik tuna daksa, Hal ini dibuktikan dengan mulainya mereka mengumpulkan barang-barang bekas untuk di olah lagi menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis atau mereka akan mengumpulkan sampah-sampah dari plastik untuk di jual ke pengepul sampah. Selain memberikan manfaat ekonomis pendekatan aksesibilitas non fisik pula memberikan manfaat terhadap penyandang disabilitas fisik untuk peduli terhadap lingkungannya.

Badan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar juga melakukan sosialisasi khususnya kepada penyandang disabilitas perempuan, seperti HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Sosialisasi dilakukan kepada organisasi penyandang cacat wanita. Sosialisasi dihadiri oleh ketua dan beberapa anggota. Sosialisasi itu dilaksanakan pada tahun 2013. Dalam sosialisasi itu juga dipaparkan materi tentang Makassar ta' tidak rantasa dengan memberikan pemahaman 3R, yaitu cara pemilahan sampah, mengurangi sampah dan mendaur ulang sampah. Selain diberikan materi, peserta juga mendapatkan tempat sampah sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menyukseskan implementasi kebijakan Makassar ta' Tidak Rantasa'.

Badan pemberdayaan perempuan bersinergi dengan HWDI melakukan pembinaan dalam hal keterampilannya untuk meningkatkan sumberdaya manusia dengan membina 100 penyandang disabilitas dengan diajarkan keterampilan memilah sampah basah dan sampah kering serta cara daur ulang sampah menjadi sandal dari eceng gondok, membuat bros, jepitan rambut, dan mengajarkan pola hidup bersih dan sehat kepada penyandang disabilitas fisik. Mengolah eceng gondok membantu mengurangi limbah eceng gondok. Pemberian pemahaman kepada penyandang disabilitas fisik tentang implementasi 3R dalam kehidupan

mereka, ternyata hanya mampu merubah perilaku sebagian kecil penyandang disabilitas fisik, dan tidak sedikit dari mereka belum menunjukkan perubahan perilaku yang diharapkan, seperti halnya tuna daksa yang mengemis di jalan. Pola pikir mereka sulit untuk dirubah karena lebih senang menjadi gembel dan pengemis (Gepeng) dipagi sampai sore, ketimbang menjadi pemulung sampah. Mereka bisa langsung mendapatkan uang yang banyak dalam sehari, ketimbang menjadi pengumpul sampah, uang yang mereka peroleh menjadi investasi dan hanya tercatat dibuku tabungan atau bahkan tidak bisa menabung karena desakan ekonomi. Uang yang mereka dapatkan dari mengumpul sampah hanya cukup menutupi kebutuhan primer sehari-hari. Di sisi lain, jika ingin lebih banyak, dibutuhkan waktu sekitar seminggu untuk menikmati hasil kerja keras mereka.

Sosialisasi terkait implemetasi 3R baik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar maupun yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, masih pada domain cara memilah dan mendaur ulang sampah. Padahal penting untuk menyampaikan informasi terkait pemasaran setelah sampah tersebut di daur ulang. Kurangnya sosialisai berkaitan promosi dan pemasaran, menyulitkan penyandang disabilitas fisik memasarkan produk daur ulang sampah mereka. Misalnya, karena strategi promosi dan pemasaran belum diketahui dengan baik, produk sandal eceng gondok masih kurang diminati oleh konsumen dalam negeri, juga mengakibatkan rendahnya minat beli dari hotel jika sandal di jual ke hotel-hotel. Tetapi Di sisi lain, produk sandal eceng gondok ini diminati oleh pihak hotel dan restoran di Belanda “Camille Oostwegel Chateau Hotels and Restaurants Netherlands”. Sandal eceng gondok ditawarkan seharga Rp.25.000. Akan tetapi, Pesanan sandal eceng gondok dari Belanda ternyata hanya 3 kali kurun waktu 2012-2013. Sehingga produksi daur ulang limbaheceng gondok tidak lagi dilakukan. Proses pembuatan sandal eceng gondok membutuhkan waktu yang lama dan kalau tidak dipasarkan cepat maka akan rusak. Sehingga produksi sandal hanya akan dilakukan ketika ada pesanan untuk efisiensi biaya dan waktu.



Gambar 4. Pengolahan Limbah Eceng Gondok menjadi Sandal Hotel.

Mengubah pola pikir penyandang disabilitas dalam Implementasi Program Makassar 'Tidak Rantasa' melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) membutuhkan proses yang tidak sebentar apalagi bagi mereka yang memiliki kekurangan secara fisik, misalnya aksesibilitas untuk membuang sampah sangat jauh. Dengan adanya sosialisasi diharapkan penyandang disabilitas fisik dapat mengubah pola pikir dan pola hidup yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih, yang tadinya sampah itu menjijikkan sekarang menjadi sampah membawa berkah karena bisa meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat.

Sosialisasi tentang program 3R yang dilakukan khusus untuk penyandang disabilitas belum rutin dilaksanakan oleh Dinas sosial Kota Makassar. Dinas Sosial lebih banyak *concern* pada Rehabilitasi Pelatihan bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar sebagai *leading sector* dalam implementasi program Makassar 'Tidak Rantasa' melalui program 3R, belum pernah melakukan sosialisasi khusus kepada penyandang disabilitas. Dinas kebersihan Kota Makassar hanya berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, khususnya di Kecamatan Tamalate yang merupakan tempat lokalisasi eks penderita kusta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HS (kepala seksi rehabilitasi penyandang cacat Dinas Sosial Kota Makassar) terkait partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program 3R melalui bank sampah di Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini dikarenakan di tempat mereka belum disiapkan Bank sampah yang seyogyanya ada di setiap kelurahan. Sehingga Masyarakat penyandang disabilitas menjualnya ke pengepul sampah. Beberapa masyarakat lebih cenderung menjualnya langsung kepada pengepul sampah, karena hasilnya langsung bisa diperoleh untuk menutupi kebutuhan primer mereka.

Sampah yang menjadi permasalahan di kota Makassar dapat diatasi dengan sikap dan tindakan yang bersahabat dengan sampah, diantaranya partisipasi masyarakat, turut sertanya pihak kelembagaan (swasta) dan pemerintah agar permasalahan persampahan dapat teratasi secara menyeluruh. Partisipasi bisa dilakukan misalnya dengan melakukan *Reuse* Penggunaan botol plastik bekas, sebagai pot bekas.

5.2.2 Pendekatan Rehabilitasi Pelatihan

Perhatian kepada penyandang cacat disabilitas penting dilakukan dalam rangka mengentaskan penyandang disabilitas dari keterbelakangan dan ketergantungan sosial ekonomi atau meningkatkan kualitas mereka. Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas fisik, juga dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi pelatihan.

Salah satu upaya penanganan yang dilakukan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah pemberdayaan melalui pelatihan kerja. Tujuannya membekali penyandang disabilitas dengan pengetahuan dan keterampilan kerja sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, ketrampilan kerja dan perubahan pola pikir serta pola hidup yang mereka mampu hidup mandiri.

Penyandang disabilitas fisik yang diberdayakan dan mendapat rehabilitasi pelatihan adalah penyandang disabilitas fisik yang masih produktif. Dinas Sosial Kota Makassar memberikan pelatihan keterampilan mendaur ulang, menjahit, membuat kue dan membuka toko menjual barang campuran dan sembako.

Pada tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kegiatan pelatihan mendaur ulang sampah dalam mendukung program Pemerintah Makassar ta' tidak rantasa yaitu mendaur ulang kain-kain bekas menjadi bros dan ikat rambut.



Gambar 5: Penyandang Eks penderita Kusta memperlihatkan hasil kerajinan daur ulang kain bekas menjadi Bros

Rehabilitasi pelatihan dalam implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) melalui bank sampah, Dinas Sosial Kota Makassar melakukan pelatihan pemilahan sampah dan daur ulang sampah di Kelurahan Balang Baru khususnya pada kompleks penyandang tuna daksa. Pelatihan yang diberikan pelatihan membuat tas dari sachet minyak goreng, membuat pot gantung dari botol bekas, membuat lampion dan membuat keset dari sisa-sisa kain bekas. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan di posyandu komplek tuna daksa yang dilakukan pada bulan april 2014. Selanjutnya pada 11 November 2015 Dinas Sosial melakukan kegiatan pelatihan sentra kerajinan yang dilaksanakan di kantor YAPTI (Yayasan pendidikan Tunanetra Indonesia) dan di ikuti oleh 100 peserta tuna daksa. Dalam pelatihan tersebut diberikan keterampilan membuat lampion (lampu hias), keset kaki, dan bros.



Gambar 6: Pelatihan penyandang disabilitas eks penderita kusta membuat keset kaki dari kain perca di Kantor Yayasan Pendidikan Tuna Netra Indonesia

Perilaku penyandang daksa setelah diberikan pelatihan, sebagian kecil ada yang berubah hingga melanjutkan kegiatan keterampilan tersebut dengan memproduksi dan memasarkannya yakni kegiatan membuat keset kaki yang ditangani oleh sebanyak 50 orang tuna daksa. Mereka bekerjasama dengan mahasiswa aksi muda Indonesia dalam hal pemasaran. Penyandang tuna daksa dihargai dengan upah Rp.20.000 per satu keset kaki. Akan tetapi tiga bulan terakhir

mereka tidak lagi membuat keset kaki karena harga yang ditawarkan hanya Rp.15.000 untuk setiap keset kaki. Keluhan mesin jahit yang sudah mulai kurang berfungsi dengan baik, juga menjadi alasan sehingga mereka tidak lagi membuat keset kaki.

Dampak pelatihan bagi sebagian besar penyandang tuna daksa tidak memberi manfaat yang signifikan. Sebagian besar penyandang tuna daksa aktif sebagai pengemis dari pagi sampai sore hari. Mereka beranggapan bahwa menjadi pengemis lebih menguntungkan dikarenakan mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Rata-rata mereka mendapatkan Rp.100.000 sampai Rp. 180.000 dalam sehari. Jika dibandingkan dengan pemulung sampah, yang hanya mendapatkan Rp.300.000 per minggu, bergantung juga pada jenis sampah yang akan ditimbang. Hanya cukup memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan pelatihan kerja belum cukup mampu mendorong penyandang disabilitas ke arah yang lebih berdaya, karena pada kenyataannya hanya sekitar 10% penyandang disabilitas fisik tuna daksa yang mampu mengubah pola pikir dan pola hidup mereka setelah diberikan pelatihan. Promosi dan pemasaran menjadi Kendala yang signifikan bagi penyandang Disabilitas fisik. Kendala pemasaran bisa diatasi jika pemerintah memfasilitasi untuk menumbuhkan minat beli masyarakat terhadap produk daur ulang dan memfasilitasi pemasaran produk daur ulang tersebut. Karena tujuan akhir dari pemberian pelatihan hingga mampu memproduksi yakni untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik dengan meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas fisik. Jika diperlukan maka ada baiknya kegiatan pemberian pemahaman dan pelatihan harus sering dilakukan sehingga tidak lagi hanya sebagian tetapi telah secara menyeluruh dapat mengubah pola pikir penyandang disabilitas fisik. Sehingga nantinya mereka akan bekerjasama untuk saling berdaya.

Pemberdayaan penyandang disabilitas fisik akan terlaksana dengan baik bukan hanya dari perlakuan khusus pemerintah terhadap penyandang disabilitas fisik. Tetapi Dukungan moril masyarakat juga sangat dibutuhkan. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (UU No.19 Tahun 2011) khususnya pasal 8 ayat 1 telah

mengatur bagaimana dukungan bagi penyandang disabilitas. Konvensi ini mengemukakan pentingnya tanggung jawab negara dalam mengambil langkah-langkah cepat, efektif dan tepat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas, melawan stereotif, prasangka dan praktik-praktik yang mengancam Penyandang Disabilitas, serta memajukan kesadaran masyarakat akan kemampuan dan kontribusi dari para penyandang cacat. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang tatanan kehidupan penyandang disabilitas, diharapkan semakin menggugah kepedulian, pengakuan, dan penghargaan akan hak-hak dalam meningkatkan kualitas hidup kaum disabilitas.

5.2.2.1 Penyediaan tempat untuk promosi dan pemasaran kerajinan daur ulang sampah

Sampah adalah konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang sangat kompleks. Segala aktivitas manusia pasti akan menghasilkan sampah, sehingga volume atau jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi barang yang kita gunakan setiap harinya. Oleh sebab itu pengelolaan sampah tidak dapat terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Dalam pengelolaan sampah sering muncul adanya masalah-masalah yang tentunya bisa menghambat proses pengelolaan sampah, diantaranya adalah biaya operasional dan kian sulitnya menemukan tempat untuk pembuangan akhir sampah. Kondisi yang seperti itu tentu saja dapat berdampak pada tingginya tumpukan sampah yang bisa mencemari dan merusak lingkungan hidup.

Namun, dengan sentuhan tangan-tangan kreatif, sampah dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan mengubahnya menjadi suatu produk kerajinan tangan yang bernilai ekonomi. Selain itu program pengelolaan sampah juga bisa menyelamatkan lingkungan hidup dari limbah sampah. Mengingat jumlah limbah sampah dikota-kota besar sangat banyak, sehingga kerajinan tangan dari limbah sampah ini akan memberikan keuntungan yang besar meskipun hanya dijalankan dengan modal kecil, atau bahkan tanpa modal sama sekali. Disamping itu, kerajinan tangan daur ulang sampah tidaklah sulit dilakukan, bisa dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali penyandang disabilitas fisik. Meskipun demikian, penyandang disabilitas fisik mempunyai keterbatasan dalam

memasarkan hasil kerajinan daur ulang sampah. Karena keterbatasan itulah sehingga mereka belum cukup berdaya secara ekonomi.

Pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pengonsumsi serta mendatangkan keuntungan bagi pihak pemroduksi. Pemasaran merupakan bidang manajemen yang sangat berperan dalam usaha mencapai tujuan yaitu keuntungan dari penjualan, sehingga kelangsungan kegiatan pemroduksi dapat bertahan dan berkembang.

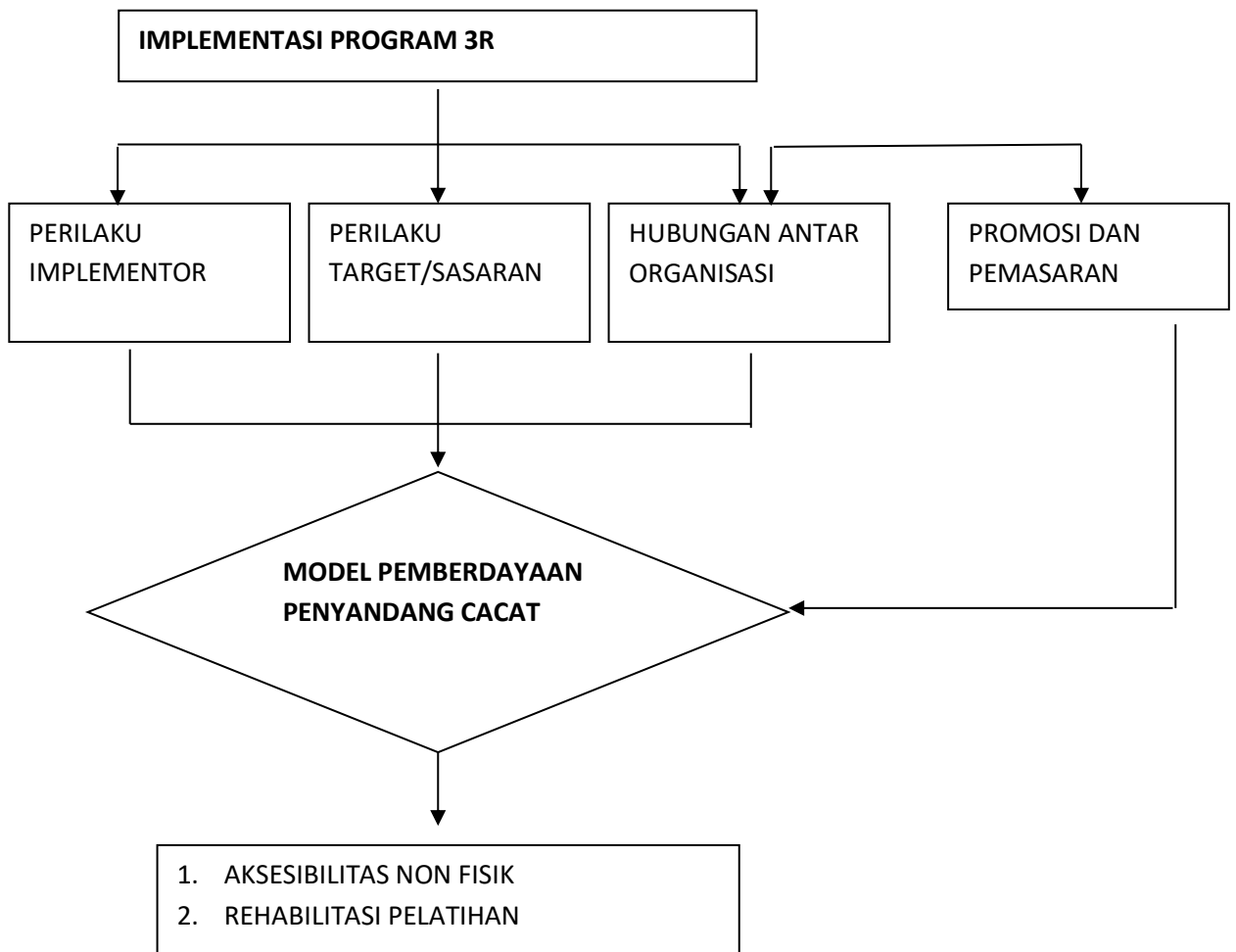
Selain Kegiatan pemasaran produk, dibutuhkan pula kegiatan promosi produk. Promosi merupakan salah satu variabel di dalam *marketing mix* yang perlu dilakukan dalam memasarkan barang dan jasa. Promosi memegang peranan penting dalam menghubungkan jarak antar pemroduksi dengan pengonsumsi. Kegiatan promosi ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

Pengertian promosi menurut Kotler dan Armstrong (2014:77) : Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan untuk membeli produk itu. Definisi tersebut dapat mengatakan bahwa dengan mengadakan kegiatan promosi, pemroduksi dapat menyampaikan berbagai informasi kepada konsumen. Promosi juga dapat membantu memperkenalkan konsumen terhadap suatu produksi untuk dapat memilih produksi mana yang diinginkannya melalui pesan yang membujuk, mengingatkan, menginformasikan, dan mendorong pengonsumsi untuk membeli produksi yang ditawarkan.

Memberikan akses bagi penyandang disabilitas fisik untuk memasarkan produk daur ulang sampah (*Recycle*) sebenarnya telah dilakukan. Badan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan peluang untuk penyandang disabilitas fisik dengan melibatkan mereka pada event MC EXPO (*Makassar City Expo*) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016 sehingga mereka mempunyai peluang untuk menawarkan hasil kerajinan tangan dari daur ulang sampah. Di event itulah juga, sekaligus menjadi tempat mereka melakukan promosi, untuk memberitahukan atau menawarkan produk pada masyarakat dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membelinya. Akan tetapi hal itu masih dinilai belum cukup mampu memberdayakan masyarakat penyandang

disabilitas fisik, karena pelaksanaannya hanya sekali dalam setahun. Minat masyarakat umum terhadap produk yang mereka tawarkan juga masih rendah. Sangat minim dukungan sosial bagi peyandang cacat untuk merasa diri berguna bagi sesama. Padahal, mereka sangat butuh dukungan dan pengakuan.

Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Implementasi Program 3R melalui Bank Sampah di Kota Makassar



BAB. 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada tahun ke 2, sesuai digambarkan pada roadmap penelitian, maka akan dilakukan simulasi model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik khususnya penyandang tuna rungu di Kota Makassar. Selain itu, dalam penelitian tahun ke 1 masih ada hal yang perlu dilanjutkan diteliti lebih dalam yaitu koordinasi atau hubungan kemitraan antar instansi Dinas Sosial, Dinas Kebersihan, dan Dinas Perdagangan dan Pariwisata dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas

fisik, untuk mensukseskan implementasi kebijakan Makassar Tidak Rantasa' (MTR) dengan mengintensifkan pemahaman tentang program 3R bagi Penyandang Disabilitas Fisik.

Pada Tahapan berikutnya, peneliti akan mempresentasikan hasil penelitian dalam forum *International Conference On Social, Humanities and Governments Science 2017* yang akan dilaksanakan oleh ADIPSI (Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia, pada tanggal 26-28 Januari 2017. Disamping itu juga publikasi ilmiah di Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA) dan juga ke jurnal internasional yang terindeks.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Perilaku implementor kebijakan dalam hal ini, Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan perempuan masih perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pemberian pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas fisik. Perilaku Penyandang disabilitas fisik dengan adanya sosialisasi dan pelatihan, tidak membawa perubahan kesejahteraan yang signifikan sehingga tidak sedikit yang menjadi pengemis. Perilaku hubungan antar instansi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik untuk efektifitas implementasi program *Reuse, Reduce* dan *Recycle (3R)* melalui Bank Sampah di Kota Makassar, belum efektif
2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam implementasi program 3R sampah di Kelurahan Balang Baru, Kompleks Jongaya Dangko Kota Makassar dilakukan dengan sosialisasi, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dan pemberian pelatihan. Sosialisasi tentang 3R melalui bank sampah, belum maksimal dilaksanakan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar. Pelibatan Penyandang Disabilitas Fisik juga dalam implementasi 3R masih rendah. Kegiatan Pemberian pelatihan kerja (*training*) belum cukup mampu mendorong penyandang disabilitas ke arah yang lebih berdaya, dikarenakan akses untuk promosi dan pemasaran hasil kerajinan daur ulang sampah masih sangat terbatas.

7.2 Saran

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan permukiman hendaknya diarahkan agar menjangkau semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kebersihan terus disebarluaskan dan dikembangkan. Sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat terus meningkat. Untuk efektivitasnya sebaiknya sosialisasi dilakukan *door to door*
2. Perlu peningkatan sosialisasi tentang penyandang disabilitas, masalah dan kebutuhan, serta karyanya guna meningkatkan kepedulian dan dukungan masyarakat kepada penyandang disabilitas.
3. Perlu dibentuk pengelola/pengurus sampah yang solid dan tangguh
4. Peran Pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana Pengembangan dan pemasaran produk daur ulang sampah.
5. Penguatan Komitmen, dukungan dan pengakuan semua pihak terhadap karya-karya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 2010.
- Disabled World. 23 Desember 2009. *Definitions of Disability*. http://www.disabledworld.com/definitions/disability_definitions.php . diakses 14 Maret 2015, pukul 18.04 WIB.
- Fredman. 1992. *Empowerment : The Politics of Alternative Development*. Cambridge : Blackwell.
- General Election Network For Disability Acces. *Sekilas Tentang Disabilitas*. 2013. <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/sekilas-tentang->

disabilitas/102-sekilas-tentang-disabilitas.diakses 14 Maret 2015, pukul 19.15 WIB.

- Ife. 1995. *Community Development : Creating Community Alternative, Vision Analysis and Practice*. Longman : Australia.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2012. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edisi 13 Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.
- Payne, Malcom. 1997. *Modern Social Work Theory, Second Edition*. London : Mac Milan Press Ltd.
- Prijono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Putri, Megayani. 2014. *Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Penderita Intellectual Disability di Kampung Idiot*. Jomban.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2008. *Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Costumer with Special Needs)*. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus disampaikan pada Focused Group Discusion. Bogor : Sahini Batik Hotel.
- Sulastrri, Andi. 2014. *Tinjauan Hukum terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Makassar.
- Tompo, Rusdin. *Masa DePan Makassar (dinamika Demokrasi dan Pemerintahan)*. 2014. Makassar :Badan arsip, perpustakaan dan Pengolahan Data.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Winter, Søren. 1990. 'Integrating Implementation Research,' in Dennis J. Palumbo and Donald J. Calista (eds), *Implementation and the Policy Process: Opening Up the Black Box*, pp. 19-38. Westport, CT: Greenwood Press.

Lampiran 1. Penerimaan Abstrak dan yang dipresentasikan pada acara Seminar Nasional II Fisip Universitas Andalas



PANITIA PELAKSANA
Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas
"Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan
Karakter Bangsa Indonesia"
Padang, 28-29 September 2016



No : 74/Ab/P/SEMNAS-II/07/2016.
Lamp : Form Peserta
Hal : **Penerimaan Abstrak**

Padang, 30 Juli 2016

Kepada Yth,
Bpk/Ibu/Sdr/i :
Nuryanti Mustari
Ihyani Malik
FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar
di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil evaluasi dari Tim Review Abstrak Panitia Pelaksana Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas menyatakan bahwa abstrak makalah/paper saudara, yang berjudul :

**PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM REDUCE, REUSE, RECYCLE DI KOTA MAKASSAR**

Dinyatakan **lulus dan layak** untuk dipresentasikan dalam **Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas : Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa**, yang akan dilaksanakan pada 28-29 September 2016 di Hotel Bumi Minang, Jl. Bundo Kandung No. 20-28 Padang, Sumatera Barat. Saudara akan diberikan waktu 15-20 menit untuk presentasi. Waktu dan jadwal presentasi akan diinformasikan kemudian.

Sehubungan dengan itu, diharapkan Saudara dapat menyiapkan makalah (*full paper*) dan dikirimkan kepada panitia seminar melalui semnasfisip2@gmail.com sebelum 3 September 2016 sesuai template terlampir. Biaya pendaftaran dibayarkan kepada :

| | |
|----------------|--------------------|
| Bank | BNI Cabang Padang |
| Nomor Rekening | 0050803815 |
| Nama Rekening | Dwiyanti Hanandini |

Sebagai informasi, biaya pendaftaran harus dibayarkan sebelum tanggal 15 Agustus 2016 dan copy bukti pembayaran serta form pembayaran seminar dikirimkan ke email semnasfisip2@gmail.com.

Hanya peserta yang terdaftar yang akan diberikan hak untuk presentasi dan sertifikat hanya akan diberikan kepada presenter dan peserta yang terdaftar.

Terima kasih atas dukungan saudara dalam seminar ini dan kami menunggu kehadiran saudara di Universitas Andalas.

Demikianlah disampaikan agar dapat dimaklumi.

Tim Review SemNas II FISIP


Dr. Asrinaldi, M.Si
Panitia Pelaksana

Alamat:
Gedung Dekanat FISIP, Kampus Universitas Andalas Limau Manih Padang
Contact Person : semnasfisip2@gmail.com Andri (081266682627)

Lampiran 2. Formulir Peserta



PANITIA PELAKSANA

Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas
"Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan
Karakter Bangsa Indonesia"
Padang, 28-29 September 2016



FORMULIR PESERTA SEMINAR NASIONAL II FISIP UNIVERSITAS ANDALAS Padang, 28-29 September 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap & Gelar : DR. NURYANTI MUSTARI, S.IP, M.SI
NBM : 1031102
Pangkat / Golongan : Penata/IIIc.....
Fakultas / Unit : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Ilmu Pemerintahan
Telepon / Faximile : 081355584880
E-mail : nuryantimustari@ymail.com
Alamat Rumah : Griya Persada Manggarupi Blok B3/6 Sungguminasa
Kabupaten Gowa
Telepon / Hp. : (0411)8211295

Dengan ini menyatakan :

- Ikut serta sebagai pemakalah **Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas** dengan judul makalah: PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM REDUCE, REUSE DAN RECYCLE (3R) MELALUI BANK SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

2. Partisipan

Biaya pendaftaran yang dibayarkan :

| | |
|--|---|
| Paket Pendaftaran | V |
| Peserta/Pemakalah Tunggal Rp. 600.000,- / orang | V |
| Peserta/Pemakalah Tambahan Rp. 300.000,- / orang | V |
| Partisipan Rp. 200.000,- / orang | |
| Paket Pemakalah + Akomodasi di Hotel Bumi Minang Rp. 1.350.000,- / orang (dua orang / kamar, check in tanggal 28 September 2016, check out tanggal 30 September 2016) | |
| Prosiding Cetak 2 eksemplar @Rp. 250.000,- | V |

Silahkan Contreng pilihan paket yang dipilih.

Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas tanggal 28-29 September 2016.

Makassar, 10 Agustus 2016

Yang menyatakan,

DR. NURYANTI MUSTARI, S.IP, M.SI
NBM.1031102

Catatan :

- Isian Formulir kesediaan dapat disampaikan kepada kami lewat email semnasfisip2@gmail.com Mohon nama peserta ditulis dengan jelas memakai huruf balok, lengkap dengan gelar akademik (untuk bahan penulisan sertifikat)
- Pembayaran registrasi peserta dilakukan melalui rekening panitia sebelum tanggal 15 Agustus 2016.

Alamat:

Gedung Dekanat FISIP, Kampus Universitas Andalas Limau Manih Padang
Contact Person : semnasfisip2@gmail.com Andri (081266682627)

Lampiran 3. Makalah yang dipresentasikan di seminar nasional II Fisip di Universitas Andalas.

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM REDUCE, REUSE, RECYCLE DI KOTA MAKASSAR

Nuryanti Mustari¹⁾, Ihyani Malik²⁾

¹⁾Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: nuryantimustari@gmail.com

²⁾Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: ihyaniislahuddin@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok yakni penyandang disabilitas kurang diberdayakan dalam melaksanakan kebijakan atau program pemerintah, karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktifitas sosial, ekonomi dan politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktifitas penuh seperti masyarakat umumnya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan model pemberdayaan penyandang disabilitas Fisik dalam implementasi program Reuse, Reduce dan Recycle (3R) di Kota Makassar. Pengembangan Model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dilakukan melalui (1) pendekatan aksesibilitas non fisik meliputi pemberian pemahaman, dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam implementasi program 3R, dan (2) pendekatan pelatihan keterampilan kerja mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan jenis-jenis penelitian yang relevan. Pengabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, seperti triangulasi terhadap data-data implementasi program pemerintah Reuse, Reduce, Recycle (3R). Pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang valid. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program pemerintah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberian pemahaman kepada penyandang disabilitas fisik terkait program 3R dilakukan cukup baik oleh Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Akan tetapi tingkat partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam mengelola sampah agar bernilai ekonomis masih perlu ditingkatkan. Sedangkan dari segi pendekatan rehabilitasi pelatihan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan pelatihan kerja belum cukup mampu mendorong penyandang disabilitas ke arah yang lebih berdaya. Disamping itu, yang masih menjadi kendala besar bagi mereka adalah strategi promosi dan pemasaran produk kerajinan daur ulang sampah.

Keywords: *Pemberdayaan, Disabilitas Fisik, Implementasi kebijakan.*

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan menurut Parsons dalam Suharto (2010) adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan menurut Parsons pada intinya dilakukan sebagai proses memampukan diri seseorang sehingga ia dapat berpartisipasi serta dapat berpengaruh dalam kehidupannya.

Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan rentan mengalami hambatan-hambatan yang dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Maka, diperlukannya perlakuan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka.

Penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak jumlahnya sehingga tidak boleh diabaikan keberadaannya. Berdasarkan catatan Kementerian Kesejahteraan Sosial, jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2.126.000 jiwa pada tahun 2012 dengan jenis kecacatan yang berbeda-beda. Sementara itu berdasarkan pendataan hasil kerja sama departemen sosial RI. dan surveyor Indonesia pada tahun 2008 bahwa terdapatnya jumlah penyandang disabilitas (34.510 orang) di propinsi sulawesi selatan yang tersebar di 24 kota/ kabupaten.

Populasi penyandang disabilitas terdata di kota Makassar sebanyak 2.250 orang yang terdiri atas 1.794 orang penyandang disabilitas fisik, 242 orang penyandang disabilitas mental dan 214 orang penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda). terdiri atas : 1.390 laki-laki (62%) dan 860 perempuan (38%). Sedangkan berdasarkan sensus BPS tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas di kota makassar jauh lebih besar yaitu sebanyak 93.629 orang dengan klasifikasi yang berbeda-beda seperti tertera dalam tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1:
Persentase Kaum Disabilitas di Kota Makassar

| No | Jenis Disabilitas | Tingkat Ketergantungan | | |
|--------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| | | Ringan | Sedang | Parah |
| 1 | Kesulitan Melihat (Disabilitas Netra) | 40.855 | 2.757 | 43.612 |
| 2 | Kesulitan Mendengar (Disabilitas Rungu /Wicara) | 11.373 | 1.778 | 13.151 |
| 3 | Kesulitan Berjalan/Naik Tangga (Disabilitas Daksa) | 10.901 | 2.686 | 13.587 |
| 4 | Kesulitan Mengingat /Berkonsentrasi /Berkomunikasi (Disabilitas Grahita) | 9.486 | 2.422 | 11.908 |
| 5 | Kesulitan Mengurus Diri Sendiri (Disabilitas Ganda) | 8.786 | 2.585 | 11.371 |
| TOTAL | | 81.401 | 12.228 | 93.629 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 2010

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011 lalu dengan diadikannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dimana Konvensi tersebut memuat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam segala bidang aspek kehidupan. Sehingga, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, negara Indonesia wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dengan memberlakukan kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi kaum disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, baik terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik bagi penyandang disabilitas.

Setiap penyandang *disabilitas* mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Termasuk kesempatan berkontribusi dalam mendukung program pemerintah kota yang ada, dalam hal ini program pemerintah kota Makassar yang merupakan derivasi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah (3R) adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Program atau Kegiatan 3R sebenarnya sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Hal ini juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas punya peluang dan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, dalam mengimplementasikan kegiatan 3R. Meski sederhana, namun dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Bahkan dengan upaya yang sungguh-sungguh, penyandang disabilitas dapat berdaya dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sebagai program yang berdasar pada perubahan perilaku manusia, tentu 3R tidak semudah yang dibayangkan. Butuh perencanaan yang matang. Butuh komitmen kuat untuk penegakannya. Dan yang terpenting juga butuh dukungan kolektif dan komprehensif dari semua *stakeholder* tak terkecuali dalam hal ini masyarakat penyandang *disabilitas*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana model pemberdayaan penyandang disabilitas dengan pendekatan aksesibilitas non fisik dan rehabilitasi pelatihan keterampilan kerja dalam implementasi program 3R melalui Bank sampah di Kota Makassar.

1.2 Tujuan Khusus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah dapat mengembangkan model pemberdayaan dengan pendekatan aksesibilitas non fisik dan rehabilitasi pelatihan keterampilan kerja dalam mengimplementasikan program 3R di Kota Makassar

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga di akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa: *Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on (Ife, 1995).*

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Priyono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan." Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

2.1.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmateri. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantuk lien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997).

Sementara itu Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Sutrisno (2000) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah. Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga non government organization hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator.

2.1.3 Penyandang Disabilitas

Definisi disabilitas berdasarkan *Disability Discrimination Act (DDA)* bahwa "Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki gangguan fisik atau mental

yang memiliki efek samping yang besar dan jangka panjang pada kemampuannya untuk melaksanakan aktivitas normal *sehari-hari*”.

Terdapat kriteria penyandang *disabilitas* dalam *Disability Discrimination Act* (DDA) yaitu:

- d. Mereka yang memiliki gangguan mental atau fisik.
- e. Gangguan tersebut memiliki efek yang buruk pada kemampuan mereka untuk melaksanakan kegiatan normal mereka sehari-hari.
- f. Gangguan tersebut memiliki efek samping yang substansial dan jangka panjang (telah berlangsung selama 12 bulan atau lebih atau selama sisa hidup seseorang).

World Health Organization (WHO) memiliki definisi sendiri mengenai disabilitas. Menurut WHO, disabilitas diartikan sebagai: istilah umum yang memiliki gangguan fungsi tubuh atau struktur, keterbatasan aktifitas dan pembatasan partisipasi. Dalam hal ini meliputi gangguan dalam fungsi tubuh atau struktur, pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh seseorang individu dalam keterlibatannya *dalam* kehidupan sehari-hari. Jadi disabilitas adalah fenomena yang kompleks yang mencerminkan interaksi antara bagian tubuh seseorang dan bagian dari masyarakat dimana dia tinggal.

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kaum disabilitas. Salah satunya adalah undang-undang mengenai Penyandang Cacat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Pada pasal 1 disebutkan bahwa:

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- d. Penyandang cacat fisik yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;
- e. Penyandang cacat mental yaitu kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
- f. Penyandang cacat fisik dan mental yaitu seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

2.1.4 Pendekatan dalam Memberdayakan Penyandang *Disabilitas*

c) Model Aksesibilitas

Model Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (UU No.4 Tahun 1997 pasal 1 ayat4).

d) Model Rehabilitasi

Model Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosial dan berinteraksi aktif di tengah keluarga/masyarakat dan lingkungannya (UU No.4 Tahun 1997 pasal 17). Rehabilitas penyandang *disabilitas* meliputi:

- Rehabilitasi Sosial, yakni untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang *disabilitas* agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.
- Rehabilitasi Pendidikan, yakni agar penyandang *disabilitas* dapat pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
- Rehabilitasi Pelatihan Keterampilan Kerja, yakni agar penyandang *disabilitas* memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

2.2 Implementasi Program Reduce, Reuse dan Recycle(3R) Melalui Bank Sampah.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah (3R) adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui bank sampah. Suatu upaya sistematis dalam membudayakan perilaku yang baru dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan masif karena setiap warga masyarakat melakukannya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik berpotensi untuk diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik disetorkan ke bank sampah. Tujuan dibangunnya bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian peranserta masyarakat agar dapat “bersahabat” dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus bersinergi dengan gerakan 3R (*reuse, reduce, recycle*), sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Pelaksanaan bank sampah diharapkan akan memberikan sebuah nilai tambah serta nilai ekonomis terhadap sampah. Keberadaan bank sampah juga akan menjadikan realisasi konsep ekonomi kerakyatan yang dapat dan mudah untuk diimplementasikan oleh siapapun termasuk penyandang disabilitas. Bank sampah juga mampu memberikan manfaat utamanya keuntungan masyarakat dari sampah tersebut. Dalam Implementasi Program 3R merujuk pada model implementasi kebijakan publik menurut Menurut Winter dalam Nugroho(2007), Mengidentifikasi empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (1) Proses pormasi kebijakan, (2) Perilaku Organisasi implementasi, (3) Prilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah (*street-level bureaucrats*), (4) Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat. Sehingga pada penelitian ini digunakan model Winter untuk menjawab permasalahan pokok yang pertama, tentang deskripsi perilaku penyandang disabilitas fisik dan peran pemerintah (birokrat) dalam mengimplementasikan program 3R, kemudian dari deskripsi masalah terkait perilaku penyandang disabilitas, maka selanjutnya akan dilakukan pengembangan model pemberdayaan penyandang disabilitas dengan pendekatan aksesibilitas non fisik dan rehabilitasi pelatihan keterampilan kerja dalam implementasi program 3R melalui Bank sampah di Kota Makassar.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Sampel Pragmatik Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada beberapa institusi yang terkait secara langsung dengan aktivitas pemberdayaan penyandang *disabilitas* fisik dalam implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) melalui bank sampah di kota Makassar. Lokasi penelitian ini terpusat di Makassar karena instansi dan lembaga atau objek penelitian juga berada di wilayah Makassar, antara lain : Dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Masyarakat Penyandang Disabilitas Daksa di Perkampungan Kusta Jongaya, HWDI serta LSM Yayasan peduli Negeri Kota Makassar.

3.2. Desain Penelitian, Pengumpulan dan Pengelolaan

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis-jenis penelitian yang relevan seperti *triangulasi* untuk memperoleh sumber-sumber informasi mengenai implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* melalui bank sampah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana model pemberdayaan penyandang *disabilitas* fisik dalam implementasi program pemerintah *3R* di kota Makassar.

Data-data yang akan diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap obyek sasaran yakni penyandang *disabilitas* fisik. Wawancara dan observasi yang mendalam dilakukan untuk mendapatkan data apa adanya atau sebagaimana yang terjadi tanpa memanipulasi dan menggeneralisasi (Sugiono, 2008). Sedangkan data sekunder akan didapatkan dengan penelusuran dokumentasi sumber-sumber penyandang *disabilitas* dengan menggunakan pendekatan positivistik, dalam implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* melalui bank sampah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat penyandang *disabilitas* fisik di Kota Makassar.

Pengelolaan data kualitatif dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memberikan kategori, mensistematisir dan memproduksi makna atas apa yang menjadi variabel penelitian. Ada tiga langkah pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Reduksi data dalam tahap ini, peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh. Penyajian data yaitu peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dan display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

3.3. Analisis Data Penelitian

Analisis data primer dilakukan atas statemen (*statement*) atau persyaratan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna dari statemen yang ada, baik makna yang bersifat implisit maupun makna eksplisit dari pernyataan atas objek yang diteliti. Uraian makna yang dikemukakan akan menunjukkan kecenderungan arah jawaban atau pengertian yang dimaksudkan oleh para informan. Sedangkan analisis data sekunder dilakukan dengan cara mendeskripsikan seluruh data-data potensi daerah khususnya data yang telah tersedia atau terdokumentasi pada masing-masing daerah, kemudian di analisis keterkaitannya dengan data primer yang diperoleh dari para informan.

IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program *Reduce, Reuse dan Recycle (3R)* dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan aksesibilitas non fisik dan Pendekatan Rehabilitasi Pelatihan.

4.1 Pendekatan Aksesibilitas Non Fisik

Terkait dengan Kebijakan pemerintah tentang Pengelolaan sampah di Makassar yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kota Makassar tentang Pengelolaan sampah pada BAB IV pasal 5 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Tujuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 yang berbunyi Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber Daya.

Program Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa' (GEMAR MTR), Sebagai suatu langkah strategis dalam menangani persoalan sampah yang sampai saat ini masih menjadi keresahan warga Kota Makassar. Kehadiran Program ini diharapkan dapat menjadi solusi, sehingga mampu mewujudkan Kota Makassar Bebas dari ancaman sampah, dan Juga program ini diharapkan dapat menunjang keberhasilan Visi Kota Makassar yaitu "Makassar Menjadi Kota yang Nyaman Untuk Semua

Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa' (GEMAR MTR) di Kota Makassar, menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Perlu melibatkan semua unsur pemerintahan, Pihak Swasta dan seluruh elemen Masyarakat tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas., untuk mengatasi masalah persampahan.

Berbagai strategi dalam pengelolaan sampah telah dilakukan, misalnya program 3R melalui bank sampah. Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui bank sampah juga telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Makassar. Dalam menjalankan Program Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa' (GEMAR MTR), Pemerintah Kota melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bersama akan dapat mewujudkan Makassar Ta' Tidak Rantasa', Tanpa adanya partisipasi dari semua pihak program ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah dan masyarakat mempunyai komitmen tentang pentingnya kerjasama untuk mendukung setiap kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mensejahterahkan, meningkatkan harkat dan martabat serta menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas fisik. Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik pemerintah ataupun organisasi non pemerintah sebagai pelaku pemberdayaan harus lebih memperhatikan langkah-langkah yang efektif untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik. Untuk mewujudkan pemberdayaan disabilitas fisik maka bagi pelaku atau pelaksana pemberdayaan harus memfasilitasi dan mendukung pengembangan kapasitas melalui pertukaran berbagai informasi, pengalaman, program-program pelatihan, dan praktik yang mampu untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas fisik.

Pemerintah diharapkan mendukung organisasi penyandang disabilitas fisik yang telah ada dan bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas fisik tersebut dalam hal untuk memberdayakan dan memenuhi setiap kebutuhan penyandang disabilitas fisik. Pada dasarnya penyandang disabilitas fisik mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seperti masyarakat pada umumnya. Dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan, setiap penyandang disabilitas fisik mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Peran pemerintah sangat penting untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka. Dinas Sosial Kota Makassar, Khususnya bidang rehabilitasi sosial berperan diantaranya melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental serta fisik dan mental. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Terdapat dua pendekatan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik yaitu pendekatan aksesibilitas non fisik dengan

memberikan pemahaman 3R, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi serta Pendekatan Rehabilitasi Pelatihan.

Dinas Sosial Kota Makassar melakukan sosialisasi di Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate yang melibatkan penyandang tuna daksa. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut Dinas sosial Kota Makassar memberikan pemahaman cara memilah sampah dan mendaur ulang sampah dengan tujuan untuk membantu mengurangi timbulnya sampah di Kota Makassar.

Menurut pengakuan Masyarakat Kelurahan Balang Baru terkhusus penyandang tuna daksa kegiatan tersebut diharapkan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas tuna daksa dalam mengubah pola pikir mereka untuk lebih memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih berguna dan bernilai ekonomis. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Makassar secara langsung menunjukkan bahwa penyandang disabilitas telah diberikan kesempatan dan turut berpartisipasi dalam mendukung program Makassar ta' Tidak Rantasa. Sosialisasi tersebut juga pernah dilaksanakan di kelurahan Buloa Kecamatan Tallo. Dalam sosialisasi tersebut ada beberapa hal penting yang dijelaskan yakni kebijakan pemerintah pusat tentang pengurangan kantong plastik (died kantong plastic) dihimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan. Merubah perilaku konsumtif yang banyak menghasilkan sampah menjadi perilaku yang minim kantong plastik. Selain itu dinas kebersihan juga menghimbau masyarakat untuk membentuk bank sampah atau minimal menjadi nasabah bank sampah untuk mengurangi sampah yang di buang ke TPA dan lingkungan bersih dan tetap menerapkan perilaku lisa (lihat sampah ambil), menjadikan lorong-lorongnya bersih dan hijau (lorong garden) dan tetap bekerja bakti setiap Sabtu dan Minggu. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar untuk masyarakat umum, tidak dikhususkan kepada penyandang disabilitas.

Pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dengan pendekatan aksesibilitas non fisik pada dasarnya merupakan pendekatan awal untuk mengubah pola pikir penyandang disabilitas terhadap segala hal yang dapat menimbulkan sampah dan dari sampah dapat didaur ulang menjadi produk yang bernilai ekonomis. Setelah pendekatan aksesibilitas non fisik ini mampu mengubah pola pikir penyandang disabilitas fisik, maka secara perlahan akan mengubah pola hidup penyandang disabilitas fisik, yang awalnya kurang peduli akan menjadi peduli. Perubahan pola pikir dalam implementasi program 3R, terlaksana cukup baik terlihat dari berubahnya pola hidup beberapa penyandang disabilitas fisik tuna daksa, Hal ini dibuktikan dengan mulainya mereka mengumpulkan barang-barang bekas untuk di olah lagi menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis atau mereka akan mengumpulkan sampah-sampah dari plastik untuk di jual ke pengepul sampah. Selain memberikan manfaat ekonomis pendekatan aksesibilitas non fisik pula memberikan manfaat terhadap penyandang disabilitas fisik untuk peduli terhadap lingkungannya.

Badan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar juga melakukan sosialisasi khususnya kepada penyandang disabilitas perempuan, seperti HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Sosialisasi dilakukan kepada organisasi penyandang cacat wanita. Sosialisasi dihadiri oleh ketua dan beberapa anggota. Sosialisasi itu dilaksanakan pada tahun 2013. Dalam sosialisasi itu juga dipaparkan materi tentang Makassar ta' tidak rantasa dengan memberikan pemahaman 3R, yaitu cara pemilahan sampah, mengurangi sampah dan mendaur ulang sampah. Selain diberikan materi, peserta juga mendapatkan tempat sampah sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menyukseskan implementasi kebijakan Makassar ta' Tidak Rantasa'.

Badan pemberdayaan perempuan bersinergi dengan HWDI melakukan pembinaan dalam hal keterampilannya untuk meningkatkan sumberdaya manusia dengan membina 100 penyandang disabilitas dengan diajarkan keterampilan memilah sampah basah dan sampah kering serta cara daur ulang sampah menjadi sandal dari eceng gondok, membuat bros, jepitan rambut, dan mengajarkan pola hidup bersih dan sehat kepada penyandang disabilitas fisik. Mengolah eceng gondok membantu mengurangi limbah eceng gondok. Pemberian pemahaman kepada penyandang disabilitas fisik tentang implementasi 3R dalam kehidupan mereka, ternyata hanya mampu merubah perilaku sebagian kecil penyandang disabilitas fisik, dan tidak sedikit dari mereka belum menunjukkan perubahan perilaku yang diharapkan, seperti halnya tuna daksa yang mengemis di jalan. Pola pikir mereka sulit untuk dirubah karena lebih senang menjadi gembel dan pengemis (Gepeng) dipagi sampai sore, ketimbang menjadi pemulung sampah. Mereka bisa langsung mendapatkan uang yang banyak dalam sehari, ketimbang menjadi pengumpul sampah, uang yang mereka peroleh menjadi investasi dan hanya tercatat dibuku tabungan atau bahkan tidak bisa menabung karena desakan ekonomi. Uang yang mereka dapatkan dari mengumpul sampah hanya cukup menutupi kebutuhan primer sehari-hari. Di sisi lain, jika ingin lebih banyak, dibutuhkan waktu sekitar seminggu untuk menikmati hasil kerja keras mereka.

Sosialisasi terkait implemetasi 3R baik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar maupun yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, masih pada domain cara memilah dan mendaur ulang sampah. Padahal penting untuk menyampaikan informasi terkait pemasaran setelah sampah tersebut di daur ulang. Kurangnya sosialisai berkaitan promosi dan pemasaran, menyulitkan penyandang disabilitas fisik memasarkan produk daur ulang sampah mereka. Misalnya, karena strategi promosi dan pemasaran belum diketahui dengan baik, produk sandal eceng gondok masih kurang diminati oleh konsumen dalam negeri, juga mengakibatkan rendahnya minat beli dari hotel jika sandal di jual ke hotel-hotel. Tetapi Di sisi lain, produk sandal eceng gondok ini diminati oleh pihak hotel dan restoran di Belanda “Camille Oostwegel Chateau Hotels and Restaurants Netherlands”. Sandal eceng gondok ditawarkan seharga Rp.25.000. Akan tetapi, Pesanan sandal eceng gondok dari Belanda ternyata hanya 3 kali kurun waktu 2012-2013. Sehingga produksi daur ulang limbaheceng gondok tidak lagi dilakukan. Proses pembuatan sandal eceng gondok membutuhkan waktu yang lama dan kalau tidak dipasarkan cepat maka akan rusak. Sehingga produksi sandal hanya akan dilakukan ketika ada pesanan untuk efisiensi biaya dan waktu.

Mengubah pola pikir penyandang disabilitas dalam Implementasi Program Makassar’ Tidak Rantasa’ melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) membutuhkan proses yang tidak sebentar apalagi bagi mereka yang memilki kekurangan secara fisik, misalnya aksesibilitas untuk membuang sampah sangat jauh. Dengan adanya sosialisasi diharapkan penyandang disabilitas fisik dapat mengubah pola pikir dan pola hidup yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih, yang tadinya sampah itu menjijikkan sekarang menjadi sampah membawa berkah karena bisa meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat.

Sosialisasi tentang program 3R yang dilakukan khusus untuk penyandang disabilitas belum rutin dilaksanakan oleh Dinas sosial Kota Makassar. Dinas Sosial lebih banyak *concern* pada Rehabilitasi Pelatihan bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar sebagai *leading sector* dalam implementasi program Makassar’ Tidak Rantasa’ melalui program 3R, belum pernah melakukan sosialisasi khusus kepada penyandang disabilitas. Dinas kebersihan Kota Makassar hanya berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan, khususnya di Kecamatan Tamalate yang merupakan tempat lokalisasi eks penderita kusta.

Dari hasil wawancara dengan HS (kepala seksi rehabilitasi penyandang cacat Dinas Sosial Kota Makassar) terkait partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program 3R melalui bank sampah di Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini dikarenakan di tempat mereka belum disiapkan Bank sampah yang seyogyanya ada di setiap kelurahan. Sehingga Masyarakat penyandang disabilitas menjualnya ke pengepul sampah. Beberapa masyarakat lebih cenderung menjualnya langsung kepada pengepul sampah, karena hasilnya langsung bisa diperoleh untuk menutupi kebutuhan primer mereka.

Sampah yang menjadi permasalahan di kota Makassar dapat diatasi dengan sikap dan tindakan yang bersahabat dengan sampah, diantaranya partisipasi masyarakat, turut sertanya pihak kelembagaan (swasta) dan pemerintah agar permasalahan persampahan dapat teratasi secara menyeluruh. Partisipasi bisa dilakukan misalnya dengan melakukan *Reuse* Penggunaan botol plastik bekas, sebagai pot bekas.

5.2 Pendekatan Rehabilitasi Pelatihan

Perhatian kepada penyandang cacat disabilitas penting dilakukan dalam rangka mengentaskan penyandang disabilitas dari keterbelakangan dan ketergantungan sosial ekonomi atau meningkatkan kualitas mereka. Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas fisik, juga dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi pelatihan.

Salah satu upaya penanganan yang dilakukan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah pemberdayaan melalui pelatihan kerja. Tujuannya membekali penyandang disabilitas dengan pengetahuan dan keterampilan kerja sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, ketrampilan kerja dan perubahan pola pikir serta pola hidup yang mereka mampu hidup mandiri.

Penyandang disabilitas fisik yang diberdayakan dan mendapat rehabilitasi pelatihan adalah penyandang disabilitas fisik yang masih produktif. Dinas Sosial Kota Makassar memberikan pelatihan keterampilan mendaur ulang, menjahit, membuat kue dan membuka toko menjual barang campuran dan sembako.

Pada tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kegiatan pelatihan mendaur ulang dalam mendukung program Pemerintah Makassar ta' tidak rantasa yaitu mendaur ulang kain-kain bekas menjadi bros dan ikat rambut.

Rehabilitasi pelatihan dalam implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) melalui bank sampah, Dinas Sosial Kota Makassar melakukan pelatihan pemilahan sampah dan daur ulang sampah di Kelurahan Balang Baru khususnya pada kompleks penyandang tuna daksa. Pelatihan yang diberikan pelatihan membuat tas dari sachet minyak goreng, membuat pot gantung dari botol bekas, membuat lampion dan membuat keset dari sisa-sisa kain bekas. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan di posyandu komplek tuna daksa yang dilakukan pada bulan april 2014. Selanjutnya pada 11 November 2015 Dinas Sosial melakukan kegiatan pelatihan sentra kerajinan yang dilaksanakan di kantor YAPTI (Yayasan pendidikan Tunanetra Indonesia) dan di ikuti oleh 100 peserta tuna daksa. Dalam pelatihan tersebut diberikan keterampilan membuat lampion (lampu hias), keset kaki, dan bros.

Perilaku penyandang daksa setelah diberikan pelatihan, sebagian kecil ada yang berubah hingga melanjutkan kegiatan keterampilan tersebut dengan memproduksi dan memasarkannya yakni kegiatan membuat keset kaki yang ditangani oleh sebanyak 50 orang tuna daksa. Mereka bekerjasama dengan mahasiswa aksi muda Indonesia dalam hal

pemasaran. Penyandang tuna daksa dihargai dengan upah Rp.20.000 per satu keset kaki. Akan tetapi tiga bulan terakhir mereka tidak lagi membuat keset kaki karena harga yang ditawarkan hanya Rp.15.000 untuk setiap keset kaki. Keluhan mesin jahit yang sudah mulai kurang berfungsi dengan baik, juga menjadi alasan sehingga mereka tidak lagi membuat keset kaki.

Dampak pelatihan bagi sebagian besar penyandang tuna daksa tidak memberi manfaat yang signifikan. Sebagian besar penyandang tuna daksa aktif sebagai pengemis dari pagi sampai sore hari. Mereka beranggapan bahwa menjadi pengemis lebih menguntungkan dikarenakan mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Rata-rata mereka mendapatkan Rp.100.000 sampai Rp. 180.000 dalam sehari. Jika dibandingkan dengan pemulung sampah, yang hanya mendapatkan Rp.300.000 per minggu, bergantung juga pada jenis sampah yang akan ditimbang. Hanya cukup memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan pelatihan kerja belum cukup mampu mendorong penyandang disabilitas ke arah yang lebih berdaya, karena pada kenyataannya hanya sekitar 10% penyandang disabilitas fisik tuna daksa yang mampu mengubah pola pikir dan pola hidup mereka setelah diberikan pelatihan. Promosi dan pemasaran menjadi Kendala yang signifikan bagi penyandang Disabilitas fisik. Kendala pemasaran bisa diatasi jika pemerintah memfasilitasi untuk menumbuhkan minat beli masyarakat terhadap produk daur ulang dan memfasilitasi pemasaran produk daur ulang tersebut. Karena tujuan akhir dari pemberian pelatihan hingga mampu memproduksi yakni untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik dengan meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas fisik. Jika diperlukan maka ada baiknya kegiatan pemberian pemahaman dan pelatihan harus sering dilakukan sehingga tidak lagi hanya sebagian tetapi telah secara menyeluruh dapat mengubah pola pikir penyandang disabilitas fisik. Sehingga nantinya mereka akan bekerjasama untuk saling berdaya.

Pemberdayaan penyandang disabilitas fisik akan terlaksana dengan baik bukan hanya dari perlakuan khusus pemerintah terhadap penyandang disabilitas fisik. Tetapi Dukungan moral masyarakat juga sangat dibutuhkan. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (UU No.19 Tahun 2011) khususnya pasal 8 ayat 1 telah mengatur bagaimana dukungan bagi penyandang disabilitas. Konvensi ini mengemukakan pentingnya tanggung jawab negara dalam mengambil langkah-langkah cepat, efektif dan tepat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas, melawan stereotif, prasangka dan praktik-praktik yang mengancam Penyandang Disabilitas, serta memajukan kesadaran masyarakat akan kemampuan dan kontribusi dari para penyandang cacat. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang tatanan kehidupan penyandang disabilitas, diharapkan semakin menggugah kepedulian, pengakuan, dan penghargaan akan hak-hak dalam meningkatkan kualitas hidup kaum disabilitas.

5.3 Penyediaan tempat untuk promosi dan pemasaran kerajinan daur ulang sampah

Sampah adalah konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang sangat kompleks. Segala aktivitas manusia pasti akan menghasilkan sampah, sehingga volume atau jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi barang yang kita gunakan setiap harinya. Oleh sebab itu pengelolaan sampah tidak dapat terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Dalam pengelolaan sampah sering muncul adanya masalah-masalah yang tentunya bisa menghambat proses pengelolaan sampah, diantaranya adalah biaya operasional dan kian sulitnya menemukan tempat untuk pembuangan akhir sampah. Kondisi yang seperti itu tentu saja dapat berdampak pada tingginya tumpukan sampah yang bisa mencemari dan merusak lingkungan hidup.

Namun, dengan sentuhan tangan-tangan kreatif, sampah dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan mengubahnya menjadi suatu produk kerajinan tangan

yang bernilai ekonomi. Selain itu program pengelolaan sampah juga bisa menyelamatkan lingkungan hidup dari limbah sampah. Mengingat jumlah limbah sampah dikota-kota besar sangat banyak, sehingga kerajinan tangan dari limbah sampah ini akan memberikan keuntungan yang besar meskipun hanya dijalankan dengan modal kecil, atau bahkan tanpa modal sama sekali. Disamping itu, kerajinan tangan daur ulang sampah tidaklah sulit dilakukan, bisa dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali penyandang disabilitas fisik. Meskipun demikian, penyandang disabilitas fisik mempunyai keterbatasan dalam memasarkan hasil kerajinan daur ulang sampah. Karena keterbatasan itulah sehingga mereka belum cukup berdaya secara ekonomi.

Memberikan akses bagi penyandang disabilitas fisik untuk memasarkan produk daur ulang sampah (*Recycle*) sebenarnya telah dilakukan. Badan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan peluang untuk penyandang disabilitas fisik dengan melibatkan mereka pada event MC EXPO (*Makassar City Expo*) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016 sehingga mereka mempunyai peluang untuk menawarkan hasil kerajinan tangan dari daur ulang sampah. Di event itulah juga, sekaligus menjadi tempat mereka melakukan promosi, untuk memberitahukan atau menawarkan produk pada masyarakat dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membelinya. Akan tetapi hal itu masih dinilai belum cukup mampu memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas fisik, karena pelaksanaannya hanya sekali dalam setahun. Minat masyarakat umum terhadap produk yang mereka tawarkan juga masih rendah. Sangat minim dukungan sosial bagi peyadang cacat untuk merasa diri berguna bagi sesama. Padahal, mereka sangat butuh dukungan dan pengakuan.

V. KESIMPULAN

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam implementasi program 3R sampah di Kelurahan Balang Baru, Kompleks Jongaya Dangko Kota Makassar dilakukan dengan sosialisasi, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi pemberian pelatihan dan penyediaan sarana untuk promosi dan pemasaran. Sosialisasi tentang 3R melalui bank sampah, belum maksimal dilaksanakan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar. Pelibatan Penyandang Disabilitas Fisik juga dalam implementasi 3R masih rendah. Kegiatan Pemberian pelatihan kerja (*training*) belum cukup mampu mendorong penyandang disabilitas ke arah yang lebih berdaya, dikarenakan akses untuk promosi dan pemasaran masih sangat terbatas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

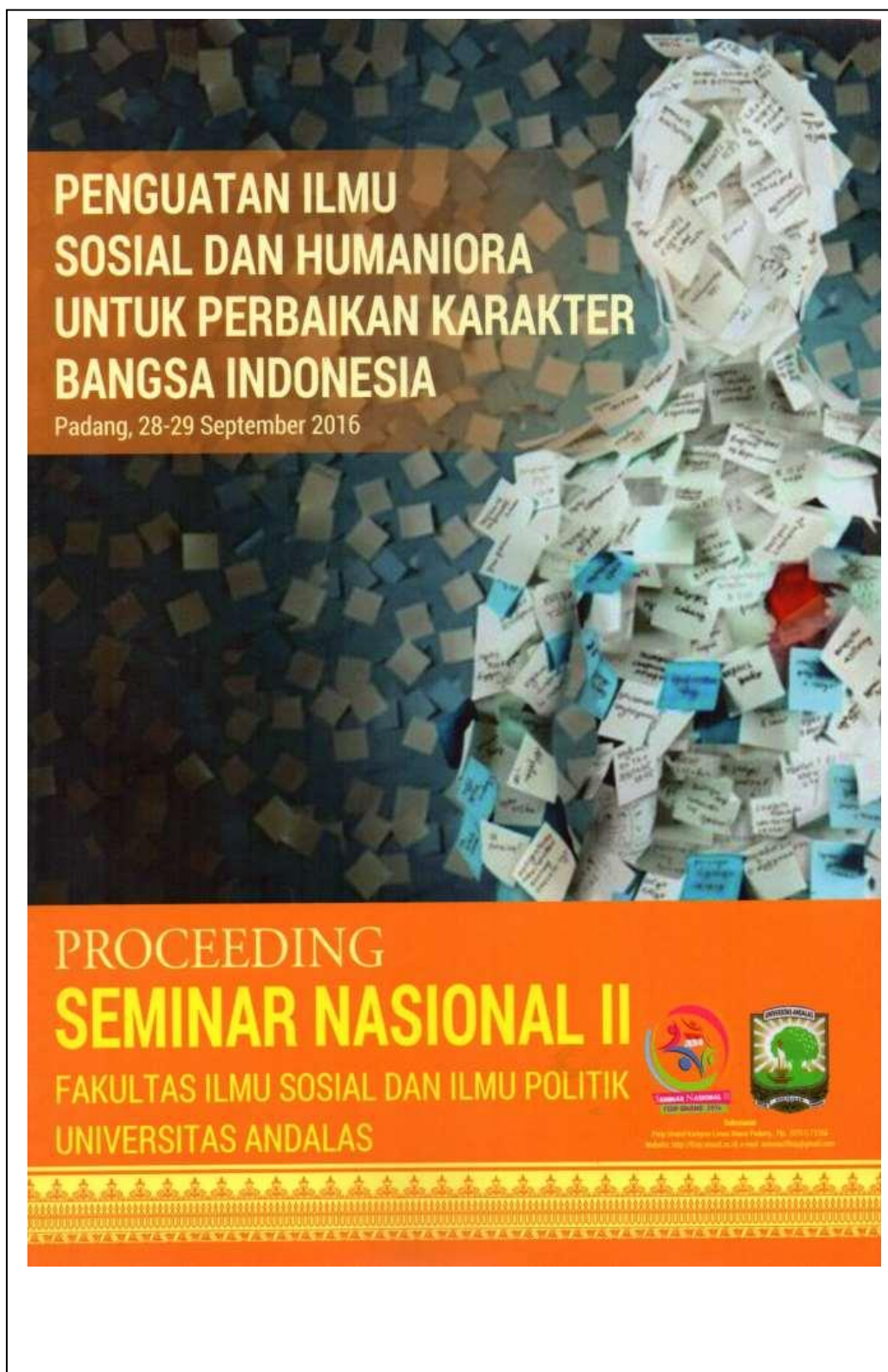
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 2010.
- Disabled World.23 Desember 2009.*Definitions of Disability*.
<http://www.disabledworld.com/definitions/disability-definitions.php>.
diakses 14 Maret 2015, pukul 18.04 WIB.
- Friedman. 1992. *Empowerment : The Politics of Alternative Development*.
Cambridge : Blackwell.
- General Election Network For Disability Acces. *Sekilas Tentang Disabilitas*. 2013.
<http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/sekilas-tentang-disabilitas/102-sekilas-tentang-disabilitas>.diakses 14 Maret 2015, pukul 19.15 WIB.
- Ife. 1995. *Community Development : Creating Community Alternative, Vision Analysis and Practice*. Longman : Australia.
- Nugroho, Riant.2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.

- Payne, Malcom. 1997. *Modern Social Work Theory, Second Edition*. London : Mac Milan Press Ltd.
- Prijono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Putri, Megayani. 2014. *Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Penderita Intellectual Disability di Kampung Idiot*. Jomban.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2008. *Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Costumer with Special Needs*. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus disampaikan pada Focused Group Discusion. Bogor : Sahini Batik Hotel.
- Sulastri, Andi. 2014. *Tinjauan Hukum terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Makassar.
- Tompo, Rusdin. *Masa DePan Makassar (dinamika Demokrasi dan Pemerintahan)*. 2014. Makassar :Badan arsip, perpustakaan dan Pengolahan Data.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Lampiran 4. Sertifikat Pemakalah



Lampiran 5. Prosiding



Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| ❖ KEBIJAKAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR) PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KELEMBAGAAN: STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH <i>Isnaini Muallidin, Mukti Fajar Dewanto, Leli Joko Suryono, Dyah Mutiarin</i> | 608 |
| ❖ KEBIJAKAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN <i>Navarin Karim</i> | 617 |
| ❖ PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PERATURAN DAERAH <i>Mochammad Fariqi</i> | 626 |
| ❖ PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM <i>REDUCE, REUSE, RECYCLE</i> DI KOTA MAKASSAR <i>Nuryanti Mustari, Iyami Malik</i> | 636 |
| ❖ JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU <i>Mustiqowati Ummul Fithriyyah</i> | 648 |
| ❖ TAX HOLIDAY: SEBUAH KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA <i>Juliannes Cadith</i> | 661 |
| ❖ PEMODELAN STATUS GIZI BALITA UNTUK MENGEVALUASI KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENANGGULANGI PREVALENSI GIZI BURUK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN <i>Aidinil Zetra, Bakaruddin Rosyidi Ahmad</i> | 672 |
| ❖ REVITALISASI KENADZIRAN KESULTANAN BANTEN DALAM MENGELOLA WISATA RELIGI DI BANTEN LAMA DAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG <i>Titi Stiawati, Rina Yulianti</i> | 682 |
| DEMOKRASI, DESENTRALISASI, GOVERNANCE | 695 |
| ❖ STRATEGI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DALAM PERSPEKTIF <i>STAKEHOLDER COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> : STUDI DI KABUPATEN KUPANG, NUSA TENGARA TIMUR <i>Suswanta, Soranto</i> | 696 |
| ❖ OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM KERJASAMA KAWASAN MARITIM: STUDI OPTIMALISASI POTENSI SUMATERA BARAT DALAM KERJASAMA <i>INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION</i> (IORA) <i>Apriwan, Silsila Asri, Wiwik Rukmi</i> | 707 |
| ❖ KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) <i>Busyra Azheri</i> | 722 |
| ❖ MITIGASI BENCANA SEBAGAI UPAYA AWAL BAGI PERSIAPAN KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI: SUATU STUDI PENDAHULUAN <i>Roni Ekha Putera</i> | 732 |
| ❖ DANA DESA: APAKAH SOLUSI MENGATASI PERSOALAN KEUANGAN DESA? <i>Hendri Koeswara, Simson Ginting</i> | 742 |
| ❖ RELASI PEMERINTAH DAN PETANI: PENGALAMAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG <i>Husni Kamil Masik, Didi Rahmadi</i> | 750 |
| ❖ REFEROMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> <i>Zaenal Hirawan</i> | 761 |

Lampiran 6. Artikel Internasional

EMPOWERMENT OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES ON THE IMPLEMENTATION OF REDUCE, REUSE, AND RECYCLE PROGRAM IN MAKASSAR

Nuryanti Mustari¹⁾, Ihyani Malik²⁾

¹⁾Government Science Department, the Social and Political Sciences Faculty, University of Muhammadiyah Makassar

Email: nuryantimustari@ymail.com

²⁾Administration Public Department, the Social and Political Sciences Faculty, University of Muhammadiyah Makassar

Email: ihyaniislahuddin@yahoo.co.id

Abstract

This study aimed to address the main problem of persons with physical disabilities that were less empowered in implementing government policies or programs, because of their physical disorders that inhibit the social, economic and political activity, thereby reducing their right to conduct full activity as the general society. This study aimed to explain the empowerment's model for the persons with physical disabilities on the implementation of Rouse, Reduce and Recycle (3R) program in Makassar. The empowerment's model development of the persons with physical disabilities was conducted through (1) non-physical accessibility approaches include providing understanding, and giving the opportunity to participate on the implementation of the 3R's program, and (2) the job skills training approach to recycle waste into useful and economical something. The method used in this study was descriptive qualitative and other types of relevant research. The data validation was conducted by triangulation techniques, such as the data triangulation for the implementation of government programs: Reuse, Reduce, and Recycle (3R). The qualitative approaches by observation and in-depth interview were used to obtain valid data and information. These were intended to explain comprehensively about the empowerment of the physical disabilities people on the implementation of government program. The results showed that giving understanding to the persons with physical disabilities related to the 3R's program was quite conducted well by the Social Welfare and Women's Empowerment and Child Protection Department of Makassar. However, the participation level of persons with physical disabilities in managing waste in order to have economic value still needed to be improved. Meanwhile, in term of the training rehabilitation approach, the results of this study showed that the empowerment form of job training was not quite been able to encourage persons with disabilities to be more empowered. Besides, the major problem for them was the promotional strategies and the product marketing of recycling handicrafts.

Keywords: *Empowerment, Physical Disabilities, Implementation of policy*

1. INTRODUCTION

According to Parsons in Suharto (2008), empowerment is a process where people become strong enough to participate in a variety of control and influence on the events and institutions that affect the life. The empowerment emphasizes that people acquire the skills, knowledge and power to affect their life and others life. Empowerment as stated by Parsons is essentially done as the process enables a person so that he/she can participate and be influential in his/her life.

Disability is person who has the physical, mental, intellectual or sensory disability in the long term and vulnerable to obstacles that can inhibit them to fully and effectively participate in society on an equal basis with others. Therefore, the special treatments are needed to meet their specific needs.

The persons with disabilities in Indonesia are quite numerous so that it should not be ignored their existence. Based on the record of the Social Welfare Ministry, the number of the disability people in Indonesia reached 2,126 million inhabitants in 2012 with the different disability types. Meanwhile, based on the collaboration data collection of Republic Indonesia Social Department and survey of Indonesia in 2008 revealed that the presence of the number of the disability people (34,510 people) in the South Sulawesi Province, which were spread in 24 districts/regency.

The population of the disability people in Makassar recorded as many as 2,250 people consisting of 1,794 people with physical disabilities, 242 people with mental disabilities, and 214 people with physical and mental disabilities (multiple). They consisted of 1,390 men (62%) and 860 women (38%). Meanwhile, based on the BPS's survey in 2010 showed that the number of the disability people in Makassar was much bigger as many as 93,629 people with different classification as shown in Table 1.1 below:

Table 1.1:
The Percentage of Persons with Disabilities in Makassar

| No | Disability Types | Dependency Level | | |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | Low | Moderate | High |
| 1 | Vision Loss (Blindness Disability) | 40,855 | 2,757 | 43,612 |
| 2 | Hearing impairment (Hearing loss and Deafness Disability) | 11,373 | 1,778 | 13,151 |
| 3 | Movement adversity (Physical Disability) | 10,901 | 2,686 | 13,587 |
| 4 | Remembering/focusing /communicating adversity (Intellectual Disability) | 9,486 | 2,422 | 11,908 |
| 5 | Physical and Mental Disability (Multiple Disability) | 8,786 | 2,585 | 11,371 |
| TOTAL | | 81,401 | 12,228 | 93,629 |

Source: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 2010

The Indonesian government has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) or the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 18 October 2011 with the presented Constitution no.19, in 2011. The Convention specifies the rights of persons with disabilities in all life aspects. Therefore, as

a country that has ratified the convention, Indonesia is obliged to respect, protect, fulfill and promote the rights of persons with disabilities in Indonesia by enacting appropriate policies to ensure access for the disabled persons, on an equal basis with others, either for physical environment, transport, information, and communication, including technologies or to other facilities and services which are opened or provided to the public for persons with disabilities.

Any persons with disabilities have the same rights and opportunities in all life aspects and livelihoods. Including the opportunity to contribute in supporting the government's programs, in this case the Makassar government's program which is the derivation of the Regulation of the Environment Minister of the Republic of Indonesia, No. 13 in 2012 on the Guidelines for the 3R's implementation through Garbage Bank. Article 1, paragraph 1 of the Regulation of the Environment Minister, No. 13 in 2012, explained that the implementation of Reduce, Reuse and Recycle or limit the amount of garbage, the reuse of garbage, and recycling (3R) is any activities that are able to reduce everything that may cause garbage, the disposable reuse activities of eligible garbage for the same function or other functions, and the activities to process garbage to be used as the new product. Furthermore, in the second paragraph, it explains that the bank is a sorting trash and garbage collection that can be recycled and/or reused which has economical value. The 3R's program or activity is actually simple, it can be done by anyone; anywhere and at any time and does not require substantial costs. It also confirms that persons with disabilities have the same chances and opportunities with the general public, in implementing the 3R's activities. Although, it is simple but the 3R can have a significant impact for the handling of waste which is often as problem around us. Even, with the earnest efforts, persons with disabilities can be empowered and independent so they can improve their welfare. As a program that is based on the change of human behavior, 3R is certainly not as easy as imagined. It takes careful planning. It takes a strong commitment to enforcement. And the most important is also needed the collective and comprehensive support from all stakeholders, in this case, it is also from persons with disabilities.

1.1. Problem Statement

Based on the background and the description above, the main problem, which is discussed in this study, is: How are the empowerment's models for persons with disabilities by non-physical accessibility approach and job skills training rehabilitation on the implementation of the 3R's program through the garbage bank in Makassar?

1.2. Objective of the study

Based on the problem statement above, the objective of this study is to develop the empowerment's models by non-physical accessibility approach and job skills training rehabilitation in implementation of the 3R's program in Makassar.

2. LITERATURE REVIEW

2.1.1. The Definition of Empowerment

Empowerment was adapted from term of empowerment which growing in Europe from the Middle Ages, continued to grow until the end of the 70s, 80s, and early 90s. Then, the concept of empowerment affected the current development theories. In connection with the meaning of the concept of community empowerment, Ife (1995) states that empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on.

The above definition defines the concept of empowerment as an effort to provide autonomy, authority, and confidence to every individual in an organization, as well as to

encourage them to be creative in order to finish the job as good as possible. On the other side, Paul (1987) in Prijono and Pranarka (1996) define that empowerment means the fair distribution of power thus increasing political awareness and power on vulnerable groups and to increase their influence on “the process and results of development.” While, the concept of empowerment according to Friedman (1992) in this case the alternative development emphasizes the politics’ primacy over the autonomy of decision-making to protect the society interest, which is based on private resources, directly through participation, democracy and social learning through direct observation.

2.1.2. The Definition of Community Empowerment

Community empowerment is a development strategy. In this development perspective, it can be realized that how important human capacity in order to increase self-reliance and internal strength over the material and non-material resources. As a development strategy, empowerment can be defined as activities to help others to gain the power to make a decision and determine the action to be performed, associated with them, including personal barriers and social action through increased ability and confidence to use the owned power by transferring power from the environment (Payne, 1997).

Furthermore, Ife (1995) narrows the definition of empowerment as the efforts to provide resources, opportunities, knowledge, and skills to the people in order to improve their ability to determine their future and to participate in and influence their community life. Sutrisno in Pujiana (2015) explains that in the empowerment’s perspective, society are empowered to manage their own development funds either from government or from other parties, in addition to they must actively participate in the selection process, planning and development implementation. The difference with participatory development is the involvement of community groups limited to the selection, planning and implementation of program, while funds are still controlled by the government. Although the formulation of the concept of empowerment vary among experts, but in essence, it can be stated that empowerment is an attempt plan designed to change or make updates to a community or society from helplessness conditions become empowered by focusing on the development of potential and self-reliance. Therefore, they are expected to have full powers of consciousness and determine their future, where the provider of government and non-government organization simply take the participants’ position, stimulants, and motivator.

2.1.3. Persons with Disabilities

The definition of disability based on the Disability Discrimination Act (DDA) states that “Persons with disabilities is someone who has a physical or mental disorder that has major side effects and long-term in its ability to carry out normal daily activities.”

There are criteria for persons with disabilities under the Disability Discrimination Act (DDA), namely:

- a. They have mental or physical disorders.
- b. The disorders have adverse effects on their ability to carry out their normal daily activities.
- c. The disorders have substantial side effects and long-term (has lasted for 12 months or more or for the rest of one’s life).

World Health Organization (WHO) has its own definition of disability. According to WHO, disability is defined as a general term that has impaired body function or structure, activity limitations and participation restrictions. In this case, it includes disruptions in body function or structure, activity limitation is a difficulty encountered by an individual in

executing a task or action. Moreover, participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in the daily life. Therefore, disability is a complex phenomenon which reflects the interaction between a person's body part and the part of society in which he/she lived.

In Indonesia, there are various laws and regulations governing the disability. One of them is the law of Persons with Disabilities contained in the Constitution No. 4 in 1997. In Article 1 states that:

Disability is any person who has a physical disorder and/or mental, which can interfere or constitute obstacles and barriers for him/her to do it properly, which consist of:

- a. Persons with physical disabilities are disabilities that cause disorders in the body's functions, such as movement, vision, hearing and speech;
- b. Persons with mental disabilities are mental disorders and/or behavior, both congenital defects or result of the disease;
- c. Persons with physical and mental disabilities are a person who has two types of disabilities.

2.1.4. The Approach in Empowerment of Persons with Disabilities

a) Accessibility Model

The accessibility model is the ease provided for persons with disabilities in order to achieve equality of opportunity in all life aspects and livelihoods (Constitution No.4 in 1997, Article 1 paragraph 4).

b) Rehabilitation Model

The rehabilitation model is directed to the proper functioning and further develops persons with the physical, mental and social disabilities to carry out a social function and actively interact in the family/community and the environment (Constitution No. 4 in 1997, Article 17). The rehabilitation of persons with disabilities includes:

- Social rehabilitation aims to redress and develop the willingness and ability of persons with disabilities in order to carry out their social function optimally.
- Educational Rehabilitation aims to persons with disabilities can study optimally in accordance with their talents, interests, and abilities.
- Job skills training rehabilitation aims to persons with disabilities have the work skills accordance with their talents and abilities.

2.2. The Implementation of Reduce, Reuse and Recycle (3R) Program through Garbage Bank

Article 1, paragraph 1 of The Environment Minister's Regulation, No. 13 in 2012, explains that the implementation of Reduce, Reuse and Recycle or the amount limit of garbage, reuse of garbage, and recycling (3R) is any activities that are able to reduce everything that may cause garbage, the disposable rouse activities of eligible garbage for the same function or other functions, and the activities to process garbage to be used as the new product. Furthermore, in the second paragraph, it explains that the bank is a sorting trash and garbage collection that can be recycled and/or reused which has economical value.

Various efforts have been conducted by the government to change the paradigm of the public about the garbage. One of them is with issue of the Environment Minister's Decree No. 13 in 2012 about the Guidelines of Reduce, Reuse and Recycle through garbage bank. It is a systematic effort to cultivate new behavior in managing the garbage which they produce to be applied in daily life with full awareness and massive because every citizen to do so. The garbage is sorted into organic and non-organic waste. Organic waste has the potential to be processed into compost, while non-organic waste is deposited to the garbage bank. The purpose of garbage bank is a strategy to build awareness of community participation in order to be "friendly" with the garbage to get direct economic benefit from garbage. Therefore, the garbage bank can not stand alone but it must be in synergy with the movement of 3R (reuse, reduce, recycle), so the direct benefits perceived are not only the economy, but also the clean, green and healthy environment construction. The implementation of garbage bank is expected to provide an added value and economical value toward the garbage. The existence of the garbage bank will also make the realization of the concept of the economical people which can be easy to be implemented by anyone, including persons with disabilities. The garbage bank is also able to provide benefits, particularly the community benefits from that garbage. In the 3R's program implementation, it refers to the model of public policy implementation. According to Winter in Nugroho (2007), identifying four key variables that influence the success of implementation consists of (1) policy formation process, (2) implementation of organizational behavior, (3) behavior of bottom-level bureaucrats' administrator (street-level bureaucrats), (4) the target groups' response of policy and change in community. Furthermore, this study used the Winter model to answer the main problem which is about the behavior's description of persons with the physical disabilities and the role of government (bureaucrats) in implementing the 3R's program, then from the problem description related to the behavior of persons with disabilities, the next step would be the development model of empowerment for persons with disabilities by applying non-physical accessibility and job skills training rehabilitation approach on the implementation of the 3R's program through the garbage bank in Makassar.

3. RESEARCH METHOD

3.1. Location and Research Pragmatics Sample

The research was conducted at some directly related institutions to the empowerment's activity for persons with the physical disabilities in implementation of the Reduce, Reuse, and Recycle (3R) program through the garbage bank in Makassar city. The research location was focused in Makassar city because institutions and agencies or the research subjects were also located in the area of Makassar, such as the Social Department of Makassar, Hygienic and Sanitation Department of Makassar, Women Empowerment and Child Protection Department of Makassar, the Community of Persons with the physical disabilities in Leprosy Village of Jongaya, HWDI and non-governmental organization (NGO) of State Caring Foundation of Makassar.

3.2. Research Design, Data Collection and Management

The research design was qualitative research approach and the other types of relevant research, such as triangulation to obtain information sources regarding to the implementation of Reduce, Reuse and Recycle (3R) program through the garbage bank. A qualitative approach was used to analyze deeply how the empowerment's model is for persons with the physical disabilities on the implementation of the 3R's government program in Makassar.

The data obtained in this study consisted of primary and secondary data. The primary data collection was done through observation and in-depth interview to the target subjects of persons with physical disabilities. In-depth interview and observation were conducted to obtain the natural data or as it happened without manipulating and generalizing (Sugiyono, 2008). While, the secondary data was obtained by a search sources documentation of persons with disabilities by using positivistic approach, on the implementation of Reduce, Reuse, and Recycle (3R) program through the garbage bank carried out to determine the extent of participation for persons with physical disabilities in Makassar. The data qualitative analysis in this study was conducted by giving category, systematic arrangement, and meaning interpretation to the study variables. There were three steps of qualitative data analysis in this study, namely data reduction, data display, and drawing and verification conclusion. Data reduction in this stage, researchers conducted the selection, and focusing on simplification, abstraction and transformation of raw data obtained. Data display referred to the researchers developed a structured information description to draw conclusions and restoration measurements and the data display or data presentation that was commonly used in this step was in the form of narrative text. Drawing and verification conclusion dealt with the researchers tried to draw conclusions and to verify with the searching of the meaning for each symptom obtained from the field, noting the order and configuration that may exist, the causality flow of phenomenon and proposition.

3.3. Data Analysis

The primary data analysis was conducted on the statements or the requirements which were expressed by the informants.

4. FINDINGS AND DISCUSSION

The empowerment of persons with physical disabilities on the implementation of Reduce, Reuse, and Recycle (3R) program was conducted through two approaches, namely non-physical accessibility and training rehabilitation approach.

4.1. Non-Physical Accessibility Approach

Associated with the government's policy on the garbage management in Makassar which is embodied in the Regional Regulation of Makassar, No. 4 in 2011 about the garbage management in Chapter IV, Article 5, states that the Government's city is on duty to ensure that the good garbage management and environmentally in accordance with the purposes as referred to in Article 4, which states that the garbage management aims to improve the public health and environmental quality as well as to utilize the garbage as the resources.

The Society Movement Program of Makassar Ta' Tidak Rantasa (GEMAR MTR) is a strategic step in addressing the garbage problem which until today is still the citizen unrest of Makassar. The presence of this program is expected to be a solution, so it is able to realize Makassar Free from the garbage threat, and also as the program which is expected to support the success of Makassar vision that is "Makassar Becomes the Comfortable City".

The implementation of the Society Movement Program of Makassar Ta' Tidak Rantasa (GEMAR MTR) in Makassar becomes the attention focus for the government's city that should be involved all government's members, private parties and all society elements, as well as for persons with disabilities to solve the garbage problem.

Various strategies in managing of garbage had been conducted, for example, the 3R's program through the garbage bank. The empowerment's effort for persons with disabilities through the garbage bank had been also conducted by the Department of Social

Welfare, Women Empowerment and the Sanitation and Landscaping of Makassar. In conducting the Society Movement Program of Makassar Ta' Tidak Rantasa (GEMAR MTR), the government involved all community elements to be able to realize the program of Makassar Ta' Tidak Rantasa', without the participation for all parties, this program can not be implemented properly.

Government and society have a commitment about the importance of corporation to support the empowerment's activity for persons with disabilities which aims to prosper, increase the inherent dignity and to eliminate discrimination against persons with physical disabilities. Furthermore, in empowering of persons with physical disabilities, the government or non-government organizations as the empowerment's agents should be more focus on effective steps to empower persons with physical disabilities. To realize the physical disabilities empowerment, the agent or implementer of empowerment should facilitate and support capacity development through exchange of information, experiences, training programs, and practice that are able to develop any potential possessed by persons with physical disabilities.

The government was expected to support organizations for persons with physical disabilities which have been existed and to cooperate with these organizations in terms of the empowerment and fulfilling the needs of persons with physical disabilities. Basically, persons with physical disabilities have the same opportunity to get an education as society in general. In terms of opportunities to get a job, any persons with physical disabilities have the opportunity to get a job in accordance with their potential.

The government's role is essential to empower persons with physical disabilities in order to increase their value and dignity. The Social Department of Makassar, particularly in the social rehabilitation areas has the role to carry out the social rehabilitation for persons with physical, mental, and multiple disabilities. Besides, the government also gives the guidance and empowerment of persons with disabilities. There were two approaches that empower persons with physical disabilities, namely non-physical accessibility approach by providing an understanding of 3R, providing the opportunity to participate and training rehabilitation approach.

The Social Department of Makassar conducted socialization in the village of Balang Baru of Tamalate District involving persons with physical disabilities. In the socialization, the Social Department of Makassar provided an understanding of the way to sort the garbage and to recycle the garbage with the aimed to help reduce the incidence of garbage in Makassar.

Based on the society statements of Balang Baru District, particularly persons with physical disabilities, the program was expected to provide many benefits for society, especially for persons with physical disabilities in changing their mindset to better utilize the garbage into more useful goods and economically valuable. The socialization undertaken by the Social Department of Makassar was directly indicated that persons with disabilities had been given the opportunity and participated to support the program of Makassar Ta' Tidak Rantasa. The socialization had been also carried out in the Buloa village of Tallo District. In this socialization, there were some important things that were described, namely the central government's policy on the reduction of plastic bags (plastic bags diet) urged the society to reduce their use. Changing consumer's behavior that produces a lot of garbage became the behavior of using minimal plastic bags. Besides, the Sanitation department also urged the society to form the garbage bank, or at least be bank consumer garbage to reduce garbage which is disposed of in the landfill and the clean environment and keep on applying *lisa* behavior (see garbage, grab it), make clean and green alleys (garden hallway) and remain devotedly every Saturday and Sunday. The

socialization undertaken by the Sanitation and Landscaping Department of Makassar was not only for the persons with disabilities, but also for the general public.

The empowerment of persons with physical disabilities by applying non-physical accessibility approach was basically an initial approach to change the mindset of persons with disabilities against all things that can lead garbage and the garbage which can be recycled into economically valuable products. After the non-physical accessibility approach was able to change the mindset of persons with physical disabilities, then, it gradually changed the living pattern of persons with physical disabilities which was initially less concerned into be more concerned. The mindset change on the implementation of the 3R's program was quite implemented well; it can be seen from the life's changing pattern of several persons with physical disabilities. This was evidences by the starting of their collecting used goods for though longer a useful and economically valuable or they collected plastic garbage to sell to the garbage's collector. In addition to provide economic benefits, the non-physical accessibility approach also provided benefits to persons with physical disabilities to care about their environment.

Women's Empowerment and Child Protection Department of Makassar also socialized to persons with disabilities, especially women, such as HWDI (Indonesian Women Disabilities Association), the Movement for the Welfare of the Indonesia Deafness Disabilities (GERKATIN), and the Indonesian Association of Persons with Disabilities (PPDI).

The socialization was conducted to the woman's disability organizations. Socialization was attended by the chairman and some members. The socialization was implemented in 2013. In the socialization, it was also presented materials about Makassar Ta' Tidak Rantasa by providing an understanding of the 3R's program, namely the garbage sorting way, reduces of garbage, and the recycle garbage. In addition to the material given, participants also got the recycle bin as a form of government attention in the successful implementation of policy of Makassar Ta' Tidak Rantasa'.

The women's empowerment department collaborated with HWDI to provide guidance in terms of the skills to improve human resources by fostering 100 persons with disabilities to be taught the skill to sort the wet and dry waste and ways to recycle waste into sandals from water hyacinth, making brooches, hair clips, and taught the clean and healthy lifestyles for persons with physical disabilities. Cultivating water hyacinth helped to reduce the waste of water hyacinth. Giving understanding to persons with physical disabilities on the implementation of the 3R's program in their life, was only able to change the behavior of some minor persons with physical disabilities, and there is not a few of them had not shown the expected behavior changes, such as persons with physical disabilities beg on the road. Their mindset was difficult to change because they were more pleased to be beggars in everyday, rather than being scavengers. They can directly get a lot of money in a day, rather than be the scavengers; the earned money becomes their investment and was only recorded in the saving book or even it can not save because of economic pressures. They money that they got from the garbage collector was only enough to cover their primary daily needs. On the other hand, if they want to get more, it took about a week to enjoy the results of their work hard.

Related socialization of the 3R implementation, which was either conducted by the Social Department of Makassar or conducted by Women's Empowerment and Child Protection, was still on the domain of the way to separate and recycle the waste. Whereas, it is important to convey information related to marketing after the recycling process. The lack of socialization related to the promotion and marketing gave difficulties to persons with disabilities to market their garbage recycling products. For example, because of the lack of good promotion and marketing strategy, the water hyacinth slipper products were

still less in demand by consumers in the country, also caused the lowest interest of buying from the hotel if the slippers were sold to the hotels. But on other hand, the slippers product of water hyacinth was demand by the hotel and restaurant in the Netherlands “Camille Oostwegel Chateau Hotels and Restaurants Netherlands”. The water hyacinth slippers were offered in the price of IDR 25,000. However, the order of water hyacinth slippers from Netherlands was only three times in the period of 2012-2013. Therefore, the production of water hyacinth recycling was no longer conducted. The production process of water hyacinth slippers took a long time and if they were not sold quickly, they will be broken. Hence, the slippers production would be only conducted when there was an order for cost efficiency and time.



Picture 1: The Water Hyacinth Recycling Product for Hotel’s Slippers

Providing access for persons with physical disabilities had been also carried out. The empowerment’s department provided the opportunity to persons with physical disabilities by involving them in the event of MC EXPO (Makassar City Expo) which was held on 8th May 2016; hence, they had the opportunity to offer the handcrafts from the recycled garbage. However, it is still considered not sufficiently able to empower persons with physical disabilities, because it was held only once in a year.

Changing the mindset of persons with disabilities on the implementation of Makassar Ta’ Tidak Rantasa’ through the 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) program requires a long time process, especially for people who have physical disabilities, such as accessibility to dispose of waste which is so far. With the socialization, it is expected to persons with physical disabilities to change their mindset and lifestyle that was previously

dirty to be transformed into clean, which previously it was disgusting rubbish, now it was a blessing because it can improve their life and society health.

The socialization of the 3R's program conducted specifically for persons with disabilities had not been routinely implemented by the Social Department of Makassar. The Social Department was more concern in the training rehabilitation for persons with disabilities.

Moreover, the Sanitation and Landscaping Department of Makassar as the leading sector on the implementation program of Makassar Ta' Tidak Rantasa' through the 3R's program had been never socialized specifically to persons with disabilities. The Sanitation Department of Makassar was only coordinated with the District's and Sub-district's government, particularly in Tamalate Distict which is where the localization of the ex-leprosy patients.

Based on the interview results with HS (the head section of Handicapped Rehabilitation Social Service of Makassar) related to participation of persons with physical disabilities on the implementation of the 3R's program through the garbage bank in Makassar revealed that it was still not optimal. It was happened because they had been not provided the garbage bank in their places that should exist in each district. Therefore, persons with disabilities sold it to the garbage collectors. Some people were more likely to sell directly to the garbage collectors, because the results could be immediately obtained to cover their primary needs. The garbage, which becomes a problem in Makassar, can be overcome by the friendly attitude and action with the garbage, including community participation, the participation of the institutional (private) and government in order that the problem can be resolved thoroughly. The participation can be done for example by making use of Reuse plastic bottles, as a former pot.

4.2. Training Rehabilitation Approach

Giving attention to persons with disabilities is important in order to alleviate raised persons with disabilities from backwardness and socio-economic dependency or improve their quality. The empowerment of persons with disabilities was also conducted through the training rehabilitation.

One effort, which was conducted by the Social Department and Women's Empowerment and Child Protection Department of Makassar, is empowerment through job training. The aim is to equip persons with disabilities with knowledge and job skills; therefore, it can increase the knowledge, job skills and change the mindset and lifestyle that they are able to live independently. Persons with physical disabilities, who were empowered and received training rehabilitation, were still productive. The Social Department of Makassar provided skills training of recycling, sewing, making cake, and opening store selling mixed goods and groceries.

In 2005, Women's Empowerment and Child Protection Department conducted the recycling training in supporting of the government's program of Makassar Ta' Tidak Rantasa', i.e., rags recycling became brooches and hair ties.



Picture 2: Persons with Physical Disabilities of Ex-Leprosy Showed the Brooch Handcrafts from Rags

The training rehabilitation on the implementation of Reduce, Reuse, and Recycle (3R) program through the garbage bank, the Social Department of Makassar conducted training of garbage sorting and recycling in Balang Baru District, particularly in the residential area of persons with physical disabilities. They were given the training to make bags from cooking oil's sachets, the hanging pot from bottles, lanterns and doormats from the remnants rags. The training was conducted in the residential area of persons with physical disabilities on April 2014. Furthermore, on 11th November 2015, the Social Department conducted the training undertaken handcrafts center in the office of YAPTI (Indonesian Blindness Education Foundation) and participated by 100 physical disabilities' participants. In the training, they were given the skills to make lanterns (lights), doormats, and brooches.



Picture 3: Training of Persons with Disabilities of Ex-Leprosy Patients to Make Doormats from Patchwork in Office of Indonesian Blindness Education Foundation

The behavior of persons with physical disabilities after giving the training showed that some of them had changed to continue the skills' activities by producing and marketing their products that made doormats which were handled by as many as 50 people with physical disabilities. They cooperated with the young Indonesian students in term of marketing. They were rewarded with wages of IDR 20,000 per one doormat. But, the last three months, they were no longer to make doormats because the price offered was only IDR 15,000 for each doormat. The complaints of sewing machine had been not functioning properly; it was also the reason that they were no longer to make doormats.

The impact of training for most of persons with physical disabilities did not provide a significant benefit. Most of them actively became as beggars. They assumed that being beggars were more profitable because they can earn a lot of money in a short time. On average, they earned IDR 100,000 to IDR 180,000 in a day when it was compared with the scavengers, who only got IDR 300,000 per week, depending also on the garbage types to be weighed. It was only enough to comply the needs of daily meals.

The results showed that the empowerment of job skills training was not quite been able to encourage persons with disabilities toward a more empowered, because in fact, there were only about 10% of them who were able to change their mindset and lifestyle after giving the training. The promotion and marketing became a significant obstacle for persons with physical disabilities. The marketing problem can be overcome if the government facilitates to foster the people interest in purchasing recycled products and facilitates the marketing of recycled products. Since, the ultimate aim of providing training is to empower persons with physical disability to improve their life. If it is necessary, giving understanding and training should be conducted, therefore, there is no longer only partially but also thoroughly can change mindset of persons with physical disabilities. Furthermore, they will work together for mutual powerless.

The empowerment of persons with physical disabilities will be conducted well not only from the government special treatments to them, but also from the public moral support is needed. Convention on the rights of persons with disabilities (Constitution No. 19 in 2011), especially in Article 8, paragraph 1 has been organized how the support for persons with disabilities. This convention states that the importance of state responsibility in taking steps quickly, effectively and appropriately in raising public awareness of the rights of persons with disabilities, against stereotypes, prejudices and practices that threaten persons with disabilities, and to promote the public awareness of the capabilities and contributions of persons with disabilities. With the government's policy that regulates the life order of persons with disabilities, it is expected to further raise the awareness, recognition, and respect for the rights in improving the life quality of persons with disabilities.

4.3. Providing a Space for the Promotion and Marketing of Recycling Handicrafts

The garbage is a consequence of the complex human activities. All human activity will inevitably produce garbage, so the volume or amount of garbage is comparable to the consumption level of the goods that we use every day. Hence, the garbage management can not be separated from the management of people's lifestyles. In the garbage management, there are often problems that certainly could hamper the garbage management process, such as the operating costs and the increasing difficulty of finding a place to landfill. These conditions absolutely affect on the high pile of garbage that can pollute and damage the environment.

However, with a touch of creative hands, the garbage can become a good business opportunity to turn it into the handicraft products that have economic value. Besides, the garbage management program can also save the environment from the garbage. Given the amount of garbage in larger cities is very much, so the handicrafts from the garbage will provide great benefits although it is only conducted with the small fund or even without any fund at all. In addition to, the recycling handicraft is not difficult to do; it can be conducted not only by everyone, but also by persons with physical disabilities. However, persons with physical disabilities had limitations in marketing their garbage recycling handicrafts. Because of these limitations, they were not sufficiently empowered economically.

Providing access for persons with physical disabilities to market the garbage recycling (recycle) product had been actually done. The Women's Empowerment and Child Protection Department provided opportunities for persons with disabilities by involving them in the event of MC EXPO (Makassar City Expo) which was held on 8th May 2016, so they had opportunity to offer their garbage recycling handicrafts. The event was also the place to them to promote, to inform or offer their products to the public with the aim to attract the customers to buy. However, it was still considered not sufficiently able to empower persons with physical disabilities, because it was actually conducted once in the year. The general public interest toward their products was still low. There was very minimal social support for persons with disabilities to feel themselves useful to others. In fact, they really need support and recognition.

5. CONCLUSION

The empowerment of persons with physical disabilities on the implementation of the 3R's program in Balang Baru sub-district, at Dangko Jongaya cluster area of Makassar was conducted by socialization, giving opportunity to participate in training, and the providing facilities for promotion and marketing. The socialization of the 3R's program through the garbage bank did not be conducted maximally by the Sanitation and Landscaping Department of Makassar. Involving persons with disabilities on the implementation of the 3R's program was still low. Providing job training was not sufficient to be able to encourage persons with disabilities to be more empowered, because the promotional and marketing access was still very limited.

6. REFERENCES

- Friedman, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell.
- Ife, J. W. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Longman Australia.
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Indonesia: Government of RI*.
- Nugroho, R. (2007). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media.
- Payne, M. (1997). *Modern Social Work Theory, Second Edition*. Palgrave Macmillan.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Centre for Strategic and International Studies.

Pujiana, Y. T. (2015). Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kantor Unit Pengelolaan Kegiatan di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Administrasi Negara*, 3 (1), pp. 393-403.


Statistik, B. P. (2010). *Makassar Dalam Angka*. Makassar: BPS Kota Makassar.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.


Suharto, E. (2008). Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus: Pengalaman Departemen Sosial. *Presented on Focused Group Discussion (FGD) "Kajian Penerapan Pelayanan Khusus."*

Lampiran 7. Submit Jurnal Internasional Avant

<http://www.scimagojr.com>

 Scimago Journal & Country Rank Enter Journal Title, ISSN

[Home](#) [Journal Rankings](#) [Country Rankings](#) [Viz Tools](#)

Avant 

Country [Poland](#)

4



Scimago Journal & Country Rank

Enter Journal Title, ISSN or Publisher Name



[Home](#)

[Journal Rankings](#)

[Country Rankings](#)

[Viz Tools](#)

[Help](#)

[About Us](#)

Avant

Country [Poland](#)

Subject Area and Category [Arts and Humanities](#)
[Arts and Humanities \(miscellaneous\)](#)
[Neuroscience](#)
[Neuroscience \(miscellaneous\)](#)
[Social Sciences](#)
[Social Sciences \(miscellaneous\)](#)

Publisher [Osrodek Badan Filozoficznych](#)

Publication type [Journals](#)

ISSN [20826710](#)

Coverage [2010-ongoing](#)

4

H Index

Lampiran 8. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian Hibah Bersaing Tahun ke 1

Informan Penelitian : Kepala seksi rehabilitasi penyandang cacat Dinas sosial Kota Makassar, Kepala seksi pengembangan partisipasi masyarakat Dinas Pertamanan kebersihan Kota Makassar, Kepala Sub Bidang Kelembagaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Maria UN (Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan) dan Ketua RT 05 Dangko (Perkampungan Kusta)

Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Implementasi Program *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) Melalui Bank Sampah di Kota Makassar

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang disifatkan general karena adanya keterkaitan di antara variabel sehingga beberapa indikator juga ditujukan kepada responden/informan yang berbeda.

| No | Variabel | Pertanyaan Wawancara |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | ➤ Pendekatan Aksesibilitas non Fisik | <p>A. Pemberian Pemahaman 3R</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah sebelumnya penyandang disabilitas fisik telah diberikan pemahan tentang program 3R ? 2) Bagaimanakah upaya dalam pemberian pemahaman 3R tersebut kepada penyandang disabilitas fisik ? 3) Bagaimanakah respon ataupun tanggapan penyandang disabilitas fisik terhadap program 3R tersebut ? 4) Bagaimanakah upaya pemberian pemahaman 3R ini mampu mengubah pola pikir penyandang disabilitas fisik ? 5) Apakah yang ingin dicapai untuk penyandang disabilitas fisik dengan pemberian pemahaman 3R ? <p>B. Pemberian Kesempatan untuk Berpartisipasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah penyandang disabilitas fisik telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam implemetasi program 3R ? 2) Bagaimanakah upaya pemberian kesempatan untuk berpartisipasi kepada penyandang disabilitas fisik dalam program 3R ? |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>3) Bagaimanakah bentuk pelibatan penyandang disabilitas fisik untuk berpartisipasi dalam program 3R?</p> <p>4) Bagaimanakah tingkat partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam program 3R?</p> <p>5) Apakah penyandang disabilitas fisik telah diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program 3R seperti pada masyarakat umumnya?</p> |
| 2. | <p>➤ Pendekatan Rehabilitasi Pelatihan</p> | <p>A. TRAINING UPAYA PEMBATAAN SAMPAH (REDUCE)</p> <p>1) Bagaimanakah upaya pemberian pemahaman kepada penyandang disabilitas fisik tentang segala hal yang dapat membatasi ataupun mengurangi sampah ?</p> <p>2) Bagaimanakah agar upaya pembatasan sampah ini dapat mengubah pola pikir penyandang disabilitas fisik untuk mengurangi timbulnya sampah ?</p> <p>3) Bagaimanakah respon penyandang disabilitas fisik tentang upaya pembatasan sampah?</p> <p>4) Bagaimana training pembatasan sampah dilakukan bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar?</p> <p>B. INDIKATOR TRAINING GUNA ULANG SAMPAH (REUSE)</p> <p>1) Apakah sebelumnya penyandang disabilitas fisik telah mengentahui tentang guna ulang sampah ?</p> <p>2) Bagaimanakah sosialisasi <i>Reuse</i> dilakukan bagi penyandang disabilitas fisik?</p> <p>3) Bagaimanakah respon penyandang disabilitas fisik</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>tentang pelatihan guna ulang sampah?</p> <p>4) Apakah dengan memberikan pelatihan guna ulang sampah mampu mengubah pola pikir penyandang disabilitas fisik?</p> <p>5) Bagaimana pelatihan guna ulang sampah dilakukan untuk penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar?</p> <p>C. INDIKATOR DAUR ULANG SAMPAH (RECYCLE)</p> <p>1) Bagaimanakah bentuk pelatihan daur ulang sampah untuk penyandang disabilitas fisik ?</p> <p>2) Bagaimanakah respon penyandang disabilitas fisik tentang pelatihan daur ulang sampah?</p> <p>3) Bagaimanakah dengan pelatihan daur ulang sampah mampu mengubah pola pikir dan meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas fisik dengan manfaat ekonomis yang dimiliki sampah yang telah didaur ulang?</p> <p>4) Bagaimana keikutsertaan penyandang disabilitas fisik sebagai nasabah bank sampah?</p> |
| 3 | <p>➤ Perilaku Masyarakat Penyandang disabilitas dan Pemerintah dalam implementasi Program 3R</p> | <p>1) Bagaimanakah perilaku penyandang disabilitas fisik setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan dalam implementasi program 3R?</p> <p>2) Apakah dengan pemberian sosialisasi dan pelatihan terjadi perubahan perilaku penyandang disabilitas yang tadinya kurang peduli terhadap sampah menjadi peduli untuk memanfaatkan sampah?</p> <p>3) Apakah nama pelatihan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas fisik</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dalam implementasi program 3R?</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Kapankah pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut dilakukan dan dimana kegiatan tersebut dilakukan? 5) Apakah dengan kegiatan pelatihan tersebut mengubah perilaku penyandang disabilitas fisik dengan mengembangkan dan memproduksi hasil dari pelatihan tersebut ? 6) Berapakah penghasilan yang didapatkan penyandang disabilitas dari hasil mendaur ulang/ mengumpulkan sampah? 7) Bagaimanakah peran instansi pemerintah dalam mengimplementasikan program 3R? 8) Apakah sebelumnya penyandang disabilitas pernah diberikan bantuan modal dari pemerintah? 9) Bagaimanakah bentuk bantuan modal yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas fisik 10) Apakah pemerintah sudah menjalin kemitraan atau kerjasama antar pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik? 11) Bagaimanakah bentuk kerjasama yang antar pemerintah? 12) Apakah organisasi penyandang disabilitas fisik sudah menjalin kemitraan dengan organisasi lain dalam memberdayakan penyandang disabilitas? 13) Bagaiamanakah perbandingan tingkat kesejahteraan antara penyandang yang bekerja |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | sebagai pemulung dan penyandang yang bekerja sebagai pengemis ? |
|--|--|---|

LAMPIRAN 9 :Susunan Organisasi Peneliti

| No. | Nama/NIDN | Instansi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|

| | | | | | |
|----|---|------------|---------------------|---------------|--|
| 1. | Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si NIDN: 0905068003 | Fak.Sospol | Administrasi Publik | 10 jam/minggu | <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir pelaksanaan dan penyiapan pelaksanaan Peneliti • Memimpin dan melakukankoordinasi TIM Peneliti dan seluruh tenaga pendukung yang akan dilibatkan dalam penelitian • Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional dan persiapan TIM • Bersama TIM pendamping mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap strategi efektifitas pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan laporan • Mengkoordinir pembuatan laporan penelitian |
| 2. | Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si | Fak.Sospol | Administrasi Negara | 8 jam/minggu | <ul style="list-style-type: none"> • Membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua TIM dalam pelaksanaan dan penyiapan pelaksanaan penelitian • Melakukan koordinasi dan menjadi koordinator dalam penyiapan survey dan observasi serta pengumpulan data bidang model pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas • Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap analisis bidang model pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dalam rangka penyempurnaan kegiatan • Bersama Ketua TIM dan pendukung lainnya mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap strategi pelaksanaan |

